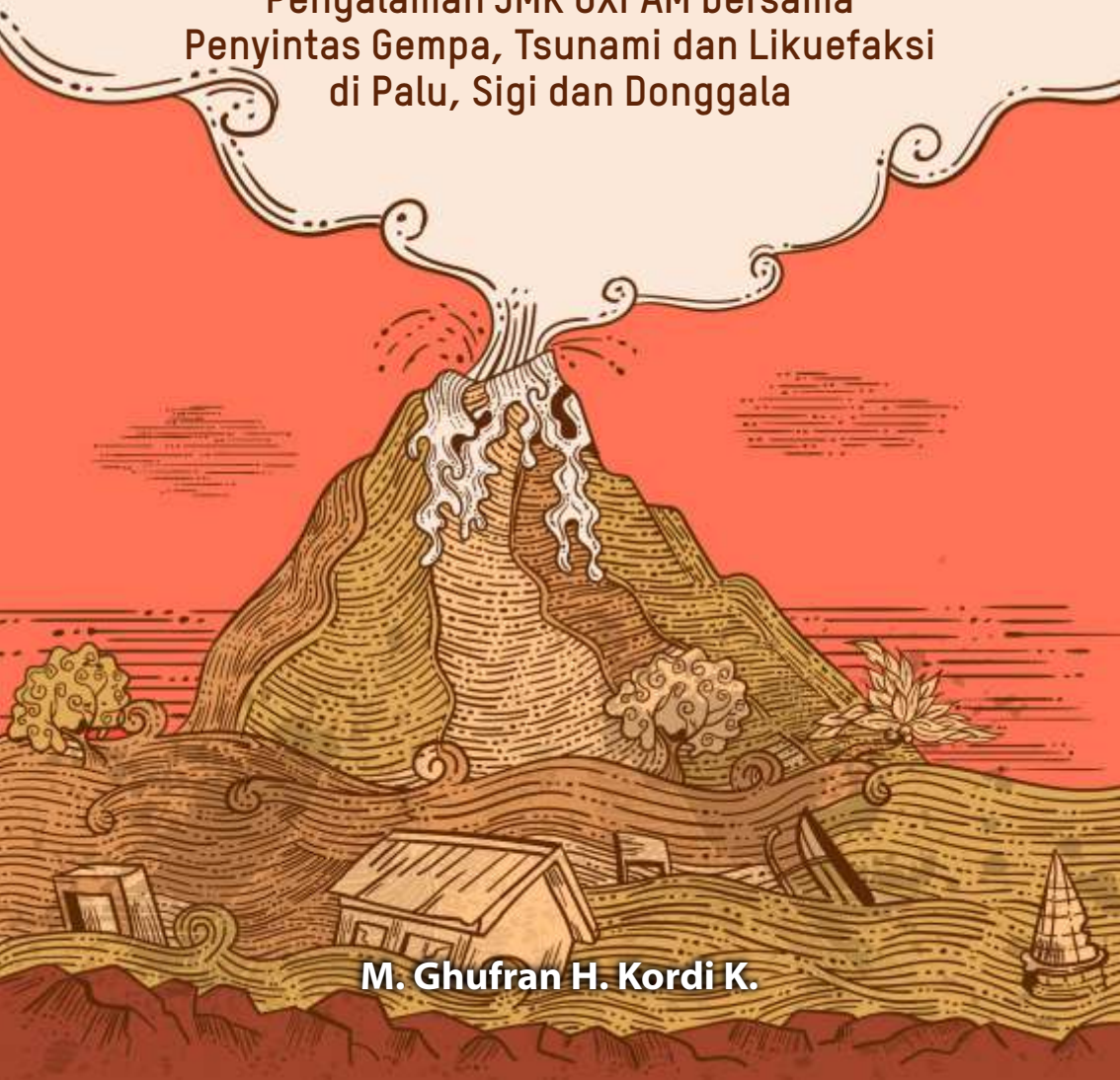


SINTAS DARI BENCANA

Pengalaman JMK OXFAM bersama
Penyintas Gempa, Tsunami dan Likuefaksi
di Palu, Sigi dan Donggala



M. Ghufuran H. Kordi K.



SINTAS DARI BENCANA

Pengalaman JMK OXFAM bersama
Penyintas Gempa, Tsunami dan Likuefaksi
di Palu, Sigi dan Donggala

Oleh :

M. Ghufran H. Kordi K.

Sintas dari Bencana

Pengalaman JMK OXFAM bersama Penyintas Gempa, Tsunami dan Likuefaksi di Palu, Sigi dan Donggala

Penulis :

M. Ghufran H. Kordi K.

Kontributor :

Dino Argiantoro, Haris Oematan, Yospina Liku La'bi, Nining Rahayu, Dgina Adenessa, Nurwahida, Ibnu Hajar, Prisca Sisca Vividayanti, Nuraida, Ifon, Ichon, Abdul Rahman Rifaldi, Maspa, Rizki Basuki, Moh. Ardiansyah Rosli, Uljannah, Amirah

Desain Sampul dan Tata Letak :

Frans Gosali

Foto: Dokumentasi JMK OXFAM

Penerbit:

JMK OXFAM

Alamat:

Jemari Sakato; Jl.Singgalang II No.16, RT.01/RW.RT 02, Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25172
Telepon : (0751) 8970723
website : www.jemarisakato.org

Cetakan Pertama : Februari 2021

- Hak Cipta dilindungi undang-undang
- Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

xvi + 88 hal.; 15 x 21 cm
ISBN 978-623-7349-39-6

Disclaimer

Isi dari dokumen ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan pendapat dari Oxfam di Indonesia dan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

SAMBUTAN

OXFAM

Indonesia merupakan negara yang sangat rentan terhadap bencana. Dengan letak serta karakteristik wilayahnya yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, Indonesia menjadi salah satu wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana alam; letusan gunung api, gempa bumi, banjir, longsor, hingga tsunami. Bencana alam tak akan pernah bisa dihindarkan. Setiap bencana menjadi proses bagi alam untuk kembali pulih dan seimbang. Karenanya, manusia harus senantiasa hidup berdampingan dengan alam dan mempelajari bencana alam yang terjadi agar mampu menangani dan mengurangi risiko dan dampak yang timbul.

Dari data BNPB per bulan Januari 2021, setidaknya sudah terjadi 221 bencana dengan ragam: gempa bumi, kebakaran lahan dan hutan, banjir, longsor, angin puyuh dan gelombang pasang serta abrasi tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Banjir menjadi jenis bencana yang tertinggi di awal tahun 2021. Dari data yang ada menunjukkan setidaknya sudah ada 1.505.077 orang yang terdampak di bulan Januari, dan angkanya akan terus meningkat. Mereka adalah penyintas yang terdampak secara langsung.

Buku Sintas dari Bencana ini menjadi salah satu pembelajaran yang diambil dari kerja JMK yang didukung Oxfam dalam Program Membangun Ketangguhan Bencana Pasigala (Palu, Sigi, Donggala) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai respons bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang terjadi pada 20 September 2018 silam. Penyintas menurut KBBI memiliki makna sebagai orang yang mampu bertahan hidup. Oxfam dan JMK dalam kemitraan bersama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia

hendak menangkap dan berbagi dari praktik yang sudah dilaksanakan dalam bencana Pasigala untuk menguatkan daya tahan penyintas. Dalam buku ini, Anda dapat membaca lebih lanjut mengenai penguatan kapasitas dalam respons bencana dan pengembangan kawasan yang inklusif dan siaga serta tangguh terhadap bencana.

Sesuai dengan semangat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, setiap aksi kemanusiaan dan pembangunan tidak boleh meninggalkan siapapun di belakang, oleh karenanya dalam buku ini kami mengedepankan semangat inklusivitas yang meningkatkan komitmen dalam pelibatan kelompok disabilitas dan perempuan dalam kebencanaan.

Semoga kehadiran buku ini member manfaat bagi Anda semua dalam hal pembelajaran dan inovasi dalam penanganan bencana. Salam siaga bencana bagi kita semua!

MARIA LAURANTI

Country Director Oxfam di Indonesia

SAMBUTAN

JEJARING MITRA KEMANUSIAAN

Jejaring Mitra Kemanusiaan (JMK) adalah suatu wadah yang menyatukan elemen-elemen pemangku kepentingan untuk koordinasi dan kerjasama, dimana anggotanya tersebar diberbagai wilayah Indonesia. Dengan keanggotaan yang tersebar dan sangat beragam, JMK hadir menjadi pusat jejaring pengetahuan yang menata kelola pembelajaran dan praktik baik dari anggota jaringan. Masing-masing anggota JMK, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terus-menerus meningkatkan kapasitas teknik dan manajemennya dalam memberikan bantuan teknis, pendampingan, dan advokasi untuk pengelolaan bencana yang bertanggung jawab, responsif gender, dan inklusif.

Mimpi besar menjadi pusat jejaring pengetahuan adalah energi JMK untuk berkontribusi pada respons dan pengelolaan bencana. Anggota JMK mempunyai pengalaman dan pembelajaran yang baik dan beragam dalam respons darurat, pemulihan, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana, yang telah teruji dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak.

Pengalaman dan pembelajaran JMK dan anggotanya adalah modal sosial dan kekuatan besar yang dimiliki, tetapi tidak harus berhenti menjadi “hak milik” JMK dan anggotanya. JMK ingin dan berupaya mengolah dan “mengikat” pengalaman dan pembelajaran yang ada untuk menjadi pengetahuan, yang dapat dibagikan kepada pihak lain, individu maupun

lembaga, untuk menjadi pengetahuan bersama bagi kepentingan kemanusiaan.

Mungkin bukan yang pertama, namun JMK adalah jejaring terkemuka, yang anggotanya tersebar dan mempunyai pengalaman dalam respon dan pemulihan bencana. Sebagai jejaring, JMK mempunyai pengalaman dan pembelajaran ganda. Pertama, pengalaman masing-masing anggota dalam meningkatkan kapasitas dan pengelolaan program, yang merupakan kekuatan masing-masing di daerahnya. Kedua, pengalaman jejaring dalam meningkatkan kapasitas anggota jejaring dan pengelolaan program di dalam jaringan di suatu wilayah.

Program Membangun Ketangguhan Bencana Pasigala (Palu, Sigi, dan Donggala) merupakan pengalaman dan pembelajaran JMK dalam pengelolaan program di dalam jejaring. Melalui program tersebut, Perwakilan 15 anggota dari 23 anggota JMK menghimpun sumber daya dan pengalaman yang dimiliki masing-masing lembaga untuk berkontribusi dalam pemulihan di Pasigala.

Program yang didukung oleh Oxfam ini mengandalkan sumber daya yang dimiliki oleh JMK, dan sumber daya lokal di Sulawesi Tengah yang dihimpun dan dikoordinasikan oleh PKBI Sulawesi Tengah. Ini menjadi pengalaman pertama dan sangat berharga bagi JMK yang mengelola sebuah program cukup besar dalam waktu singkat, dengan mengandalkan sumber daya dan kekuatan yang dimiliki JMK dan sumber daya lokal yang ada di Pasigala.

Sebagian dari pengalaman dan pembelajaran di Pasigala telah “diikat” menjadi pengetahuan di dalam buku ini. Buku ini menjadi salah satu bukti bahwa tujuan JMK sebagai pusat jejaring pengetahuan yang menata kelola pembelajaran dan praktik baik mulai direalisasikan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dan *Stakeholder* terkait serta Oxfam yang telah memberi dukungan untuk Program di Pasigala,

termasuk dukungan untuk penulisan buku ini. Terima kasih juga disampaikan kepada semua anggota JMK dan staf yang berkontribusi selama pelaksanaan program. Tidak lupa kepada kawan M. Ghufuran H. Kordi K yang telah menulis buku ini. Semoga buku ini menjadi pengetahuan dan pembelajaran dalam respon bencana, serta khazanah bagi pustaka di tanah air.

Padang, Februari 2021

Management HKH - JMK

ROBI SYAFWAR

Koordinator

SAMBUTAN

LEAD RECOVERY MANAGER PKBI JMK OXFAM

**Asalamu Alaikum Wr. Wb. dan
Salam Sejahtera bagi Kita Semua**

Salam Tangguh, Salam Inklusi!!!

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku Sintas dari Bencana ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini adalah cerita, pengetahuan, dan pengalaman serta inovasi yang kami lakukan bersama multistakeholder, untuk penanganan penyintas di 33 desa wilayah respon PKBI-JMK-Oxfam selama satu tahun, dalam melaksanakan Proyek Pemulihan Bencana Tsunami, Gempa Bumi, dan Likuefaksi di Sulawesi Tengah, khususnya Pasigala (Palu, Sigi, dan Donggala).

Berbagai suka duka, hambatan, dan tantangan yang dihadapi terutama di tengah respon terjadi bencana nasional nonalam, yaitu Pandemi Covid-19, yang benar-benar menguras waktu dan tenaga tim proyek. Tim melakukan berbagai strategi agar program tetap berjalan di tengah wabah menuju ketangguhan. Dengan sujud syukur apa yang diharapkan, semuanya dapat berjalan dengan baik selama satu tahun sesuai dengan target awal, tentunya dengan ketangguhan tim, semangat yang luar biasa, didukung oleh kapasitas yang mumpuni dan kerjasama semua tim PKBI-JMK dan Oxfam serta masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah daerah. Tantangan dan hambatan dapat teratasi dengan baik dan

capaian program pada 33 desa dapat berjalan dan tercapai sesuai target yang direncanakan.

Buku ini hadir sebagai cerita sukses program yang telah dilaksanakan selama satu tahun. Hal ini bisa menjadi panduan sekaligus dapat memperkaya wawasan para praktisi dan penggiat bencana, juga sebagai bahan latihan untuk meningkatkan kapasitas para aktifis dan para pihak yang ada di lapangan ataupun di masyarakat.

Belajar dari kejadian bencana di Sulawesi Tengah (Palu, Sigi, dan Donggala) dan beberapa bencana yang sering terjadi yaitu banjir bandang, longsor di Rogo, Kulawi, Tuva dan konflik sosial di Poso, angin puting beliung dan saat ini Pandemi Covid-19. Bencana yang telah terjadi Sulawesi Tengah ibaratnya “super market” bencana yang lengkap. Bencana yang terjadi berulang-ulang, mengharuskan masyarakat membangun mekanisme yang memadai melalui mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Jika bencana terjadi, masyarakat sudah mempunyai kemampuan melakukan penanganan, dari tanggap darurat hingga pemulihan. Inilah yang disebut masyarakat tangguh bencana. Masyarakat yang hidup bersahabat dengan bencana dan tangguh menghadapi bencana adalah masyarakat yang disiapkan dalam proyek ini. Berbagai inovasi, metode, dan pendekatan digunakan untuk menyiapkan masyarakat, mulai dari pengalaman, kebiasaan, kearifan lokal, hingga penggunaan ilmu dan teknologi.

Kami mempersembahkan buku Sintas dari Bencana ini sebagai bagian dari pengalaman PKBI Sulteng menjadi Leader dalam menjalankan proyek konsorsium membangun ketangguhan ini sebagai lembaga lokal yang merupakan anggota JMK Oxfam bersama penyintas gempa, tsunami dan likuefaksi selama satu tahun di Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak atas kerja kerasnya dalam penyusunan buku ini, terutama kepada Bapak M. Ghufran H. Kordi K. sebagai

penulis buku ini. Dan kontribusi dari kakak-kakak tim program baik Program Manager (Om Haris Oematan), Senior Officer Program (Kakak Nining), Tim GEDSI, Tim WASH (PHP & PHE), Tim Livelihood, Tim Logistik, Tim Finance, Team MEAL dan MEDCOM, Tim HR dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Selain itu kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Manajemen Oxfam di Indonesia khususnya kepada Ibu Maria Lauranti (Country Director), Ibu Siti Khoirun Ni'mah, Pak Dino Argianto (Operation Lead Humanitarian Sulteng) untuk dukungannya dalam penyusunan buku Sintas dari bencana ini. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih untuk semua Program Manager, Koordinator JMK, Pilar I, Pilar II, Pilar III JMK dan anggota konsorsium JMK yang turut mendukung secara moril sehingga buku Sintas dari Bencana dapat disusun untuk pembelajaran bersama konsorsium JMK, lembaga mitra, dan pihak lainnya yang membutuhkan.

Harapan kami semoga buku Sintas dari Bencana ini dapat bermanfaat bagi pihak berkepentingan khususnya bagi internal PKBI Sulteng, JMK, pemerintah, mitra, NGO dan Tim Program Pemulihan Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi di Sulawesi Tengah.

Disadari sepenuhnya bahwa buku Sintas dari Bencana ini masih jauh dari kesempurnaan maka sangat diharapkan masukan konstruktif semua pihak guna perbaikan buku ke depannya. Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Palu, Februari 2021

PKBI-JMK-Oxfam

YOSPINA LIKULA'BI, SE, MA
Lead Recovery Manager

PRAKATA

Indonesia sangat rentan bencana alam karena letak, posisi, dan karakteristik wilayah Indonesia secara geologis, hidrologis, klimatologis, oseanologis, dan topografis yang mengkondisikan dan memungkinkan terjadinya bencana. Bencana alam yang sangat umum terjadi di antaranya gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, likuefaksi, banjir, longsor, gelombang pasang, dan angin puting beliung.

Bencana alam adalah mekanisme alam dalam menjaga proses-proses di alam, seperti pemulihan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Manusia tidak bisa menghentikan peristiwa-peristiwa tersebut, tetapi manusia dapat belajar untuk mencegah dan mengurangi korban dan kerugian. Manusia mempunyai kemampuan memprediksi datangnya bencana alam yang memungkinkan manusia mencegah dan mengurangi risiko atau bahaya dan dampak yang ditimbulkannya.

Manusia juga dapat hidup akrab dan bersahabat dengan bencana alam dengan belajar dari bencana yang telah terjadi berulang-ulang. Untuk itu, masyarakat harus membangun mekanisme yang memadai melalui mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Jika bencana terjadi, masyarakat mempunyai kemampuan melakukan penanganan, dari tanggap darurat hingga pemulihan. Inilah yang disebut masyarakat tangguh bencana.

Masyarakat yang hidup bersahabat dengan bencana dan tangguh menghadapi bencana adalah masyarakat yang disiapkan sejak dini. Berbagai metode dan pendekatan digunakan untuk menyiapkan masyarakat, mulai dari pengalaman, kebiasaan, kearifan lokal, hingga penggunaan ilmu dan teknologi mutakhir.

Pengalaman, pembelajaran, dan inovasi yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam penanganan bencana, perlu diikat menjadi pengetahuan yang dapat dibagikan, dimodifikasi, dan dikembangkan untuk menghasilkan metode dan pendekatan yang lebih baik. Untuk itu apa saja yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga ketika terjadi bencana, baik tanggap darurat maupun pemulihan harus menjadi dokumen pembelajaran dan pengetahuan bagi semua pihak.

Buku (*e-book*) sederhana berjudul SINTAS DARI BENCANA ini adalah pengalaman dan pembelajaran JMK yang didukung Oxfam dalam Program Membangun Ketangguhan Bencana Pasigala (Palu, Sigi, Donggala) Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai respon terhadap bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang terjadi pada 28 September 2018. Buku ini memotret beberapa pembelajaran penting dalam program tersebut.

Buku ini dapat diselesaikan atas kepercayaan dan dukungan teman-teman dari JMK dan Oxfam. Terima kasih kepada Mas Dino Argianto dari Oxfam atas diskusinya yang sangat berharga mengenai potensi dan penguatan NGO lokal. Om Haris Oematan (JMK-CIS) yang selalu saya ganggu untuk diskusi dan konsultasi mengenai JMK dan program di Pasigala. Terima kasih Om Haris Oematan sudah mengingatkan saya mengenai kemampuan terpendam dari NGO/OMS yang selama ini dilihat sebelah mata, termasuk oleh kalangan NGO sendiri.

Bu Yospina Liku La'bi (JMK-PKBI Sulteng) dan Nining Rahayu (JMK-LBH APIK Sulteng) atas penerimaan dan dukungannya ketika saya berada di Palu untuk mengunjungi narasumber. Terima kasih Bu Yospina Liku La'bi dan Nining Rahayu telah berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai penanganan penyintas bencana.

Terima kasih juga kepada Ibnu Hajar (*MEAL Officer*), Degina Adenessa (*Media & Communication Officer*), Prisca Sisca Vividayanti (*MEAL Assistant*), Nuraida (*Livelihood Officer*),

Ifon (WASH-PHP *Officer*), Ichan (*Gender & Protection Officer*), dan kawan-kawan di Palu, Sigi, dan Donggala yang tidak sempat disebutkan di dalam prakata ini, yang telah memberikan data, informasi, dan menemani saya ketika melakukan wawancara dengan narasumber. Kalian semua sangat menyenangkan dan membanggakan, semoga kita dapat bertemu dan berdiskusi pada kesempatan yang lain.

Dalam menulis buku ini, penulis telah berupaya menyajikannya secara baik, namun kekurangan dan kelemahan, baik isi maupun redaksional dapat ditemukan di dalam buku ini. Karena itu, setiap masukan dan koreksi dari pembaca diterima dengan ikhlas dan ucapan terima kasih.

Gowa - Sulsel & Palu - Sulteng 2021

Penulis,

M. GHUFRAN H. KORDI K.

DAFTAR ISI

Sambutan Oxfam	i
Sambutan Jejaringan Mitra Kemanusiaan	iii
Sambutan Lead Recovery Manager PKBI JMK Oxfam	vi
Prakata	ix
Daftar Isi	xii
Istilah dan Singkatan	xiv
1. Pendahuluan.....	1
2. Ketangguhan dan Keberlanjutan	6
A.Lokalitas.....	6
B.Tidak Memulai dari Awal	9
C.Kelompok Berisiko/Rentan	10
D.Masyarakat Tangguh	10
D.Keberlanjutan.....	11
3. Memperkuat Penyintas.....	13
A.Bertanam Sayur di Pinggiran Kota	13
B.Tambak Garam Talise	15
C.Menjahit Harapan.....	17
D.Laut Selalu Memberi	19
4. Mengubah Kebiasaan untuk Hidup Sehat	21
5. Memberdayakan Perempuan.....	28
A.Perempuan Penyintas Bencana.....	29
B.Perempuan di Ranah Publik	31

6. Melibatkan Disabilitas dan Melindungi Anak	35
A.Melibatkan Disabilitas	36
B.Melindungi Anak	39
7. Kampung Siaga Bencana Inklusi	42
A.Siap Siaga Menghadapi Bencana	44
B.KSB Inklusi	45
8. Kesetaraan Gender dan Inklusi.....	47
A.Kesetaraan Gender	49
B.Inklusi	50
9. Beradaptasi di Masa Pandemi.....	53
10. Pelibatan Jurnalis	59
A.Jurnalis dan Bencana	60
B.Mengubah Perspektif Jurnalis	62
Senarai Pustaka	66
Profil	67
Tentang Penulis.....	85

ISTILAH & SINGKATAN

AIDS	: <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
Anak	adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
BAB	: Buang Air Besar
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
BMKG	: Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika
BPNP	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
CO	: <i>Community Organizer</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
GEDSI	: <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i>
GESI	: <i>Gender Equality and Social Inclusion</i>
Gender	adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural
HIV	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
HKSR	: Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi
HWDI	: Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia
ILO	: <i>International Labour Organizations</i>
IMS	: Infeksi Menular Seksual
Inklusi sosial	digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk, dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya. Atau kondisi di mana semua individu atau kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan

JMK	: Jejaring Mitra Kemanusiaan
KPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
KSB	: Kampung Siaga Bencana.
KSBI	: Kampung Siaga Bencana Inklusi.
KTD	: Kehamilan yang Tidak Diinginkan
LBH APIK	: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MCK	: Mandi Cuci Kakus
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
NGO	: <i>Non Governmental Organization</i>
NOAA	: <i>National Oceanic and Atmospheric Administration</i>
ODHA	: Orang dengan HIV/AIDS
OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil
P2T2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Pasigala	: Palu, Sigi dan Donggala
Patriarki	adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan sistem sosial atau ideologi di mana laki-laki sebagai kelompok dominan mengendalikan kekuasaan terhadap kelompok perempuan. Kepercayaan atau ideologi bahwa lelaki lebih tinggi kedudukannya dibanding perempuan. Norma-norma moral maupun hukum juga bersifat standar ganda yang memberikan lebih banyak hak kepada kaum laki-laki dibanding kepada perempuan. Patriarki berarti sistem yang menindas serta merendahkan kaum perempuan, baik dalam lingkungan rumah tangga maupun dalam masyarakat (Bhasin & Khan, 1999)
Penyanggah disabilitas	adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak

Perdes	: Peraturan Desa
PHBS	: Perilaku Hidup Bersih Sehat
PHP	: <i>Public Health Promotion</i>
PKBI	: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
RKP Desa	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
RPJM Desa	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RRC	: Republik Rakyat China
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
STBM	: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
UKM	: Usaha Kecil Menengah
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UNFPA	: <i>United Nations Fund for Population Activities</i>
UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>
USAID	: <i>United States Agency for International Development</i>
WASH	: <i>Water and Sanitation Hygiene</i>
WC	: <i>Water Closed</i>

1

PENDAHULUAN

Bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, longsor, gelombang pasang, angin ribut, likuefaksi (pencairan tanah), dan sebagainya adalah peristiwa alam yang akan selalu terjadi di wilayah Indonesia. Secara tektonik, Indonesia merupakan wilayah yang sangat labil di dunia. Indonesia berada dalam satu kawasan yang terletak pada daerah pertemuan tiga lempeng bumi (*triple junction plate convergence*). Ketiga lempeng itu—Eurasia, Samudera Pasifik dan Indo Australia—bergerak relatif ke barat dan ke utara terhadap Eurasia.

Indonesia juga mempunyai banyak gunung api yang berada di cincin api pasifik (*the pacific ring of fire*). Untaian itu bermula di Kamchatka Alaska, Jepang, Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Flores, Sulawesi, Maluku dan berakhir hingga Filipina.

Karenanya Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan tinggi di dunia. Dibandingkan dengan gempa di Amerika Serikat maka Indonesia memiliki frekuensi gempa 10 kali lipatnya. Menurut data BMKG rata-rata dalam setahun terjadi gempa tektonik sebanyak 6.298 kali di wilayah Indonesia atau dalam sebulan rata-rata 524 kali (Kompas, 21/01/2021). Sebagian dari gempa tersebut menyebabkan terjadinya tsunami. Tsunami merupakan kata



Memperkuat penyintas agar bangkit. (Foto: Degina Adenessa)

serapan dari Jepang, yakni tsu berarti pelabuhan dan nami berarti gelombang atau ombak. Kata ini pertama kali digunakan untuk menyebut gelombang dahsyat setelah gempa yang menghancurkan pelabuhan dan pemukiman di Sendai, Jepang, 2 Desember 1611.

Indonesia merupakan negara dengan frekuensi tsunami terbanyak, selain jumlah dan korban jiwanya. Dibandingkan Jepang, frekuensi tsunami di Indonesia lebih banyak. Menurut NOAA, pada 1800-2020 terjadi 223 tsunami di Indonesia, sedangkan di Jepang terjadi 222 kali tsunami.

Bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan likuefaksi adalah peristiwa yang terjadi secara alami. Manusia tidak bisa menghentikan bencana alam tersebut, namun manusia mempunyai kemampuan untuk meminimalisasi kerusakan dan korban. Manusia dapat beradaptasi, bersahabat, dan akrab dengan bencana.

Pasca bencana, korban harus mendapat dukungan untuk bangkit dan menjalani kehidupan seperti sebelumnya. Fase-fase penanganan bencana yang dimulai dari tanggap darurat, rehabilitasi, hingga pemulihan bukanlah pekerjaan yang mudah. Wilayah Indonesia yang luas,

topografi yang sangat beragam dengan penduduk yang menyebar merupakan faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan bencana.

Walaupun wilayah Indonesia sangat rawan bencana, namun setiap kali terjadi bencana, bangsa ini seperti gagap untuk menanganinya. Instrumen nasional mengenai penanggulangan bencana pun baru dibentuk pada tahun 2007 yakni Undang-Undang Penanggulangan Bencana (UU No. 24 Tahun 2007), padahal sebelumnya Indonesia menghadapi berbagai bencana, yang terbesar adalah gempa dan tsunami Aceh dan Sumatera Utara 2004.

Di samping itu, penanganan bencana di negeri ini sangat bias. Mulai dari pembangunan tempat pengungsian, hunian sementara, hingga bantuan yang disalurkan pun tidak menunjukkan keanekaragaman korban. Seakan-akan semua korban bencana adalah laki-laki dewasa. Perempuan dan kelompok berisiko atau rentan tidak mendapat perhatian yang memadai dari berbagai lembaga dan organisasi yang turut serta dalam penanggulangan bencana.

Perempuan dan kelompok rentan, yaitu disabilitas, anak, perempuan hamil, perempuan menyusui, dan lanjut usia, adalah kelompok-kelompok yang sangat rentan ketika terjadi bencana. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara maju pun ketika terjadi bencana, perempuan dan kelompok rentan lebih banyak menjadi korban. Data BNPB menyebut perempuan memiliki risiko 14 kali lebih tinggi menjadi korban jiwa bencana alam dibanding laki-laki. Pada bencana tsunami di Aceh 2004, sebanyak 55-70% korban meninggal adalah perempuan.

Ketika menjadi pengungsi di tempat penampungan, perempuan dan kelompok rentan juga mempunyai kebutuhan yang berbeda, sementara bantuan yang masuk di tempat-tempat pengungsian umumnya sama, makanan dan pakaian untuk orang dewasa. Yang selalu kurang adalah pembalut, pakaian dalam perempuan, susu bayi, makanan untuk bayi, pakaian bayi dan anak.

Tempat pengungsian dan hunian sementara yang dibangun pun tidak memberikan akses yang aman dan nyaman untuk perempuan dan kelompok rentan. Toilet atau jamban yang dibangun berdampingan untuk perempuan dan laki-laki, atau bahkan digunakan bersama untuk

perempuan dan laki-laki. Toilet untuk disabilitas, anak, dan lanjut usia sangat kurang atau bahkan tidak ada. Tidak disediakan tempat bermain dan belajar untuk anak, dan sebagainya.

Penanganan korban bencana yang bias terjadi karena soal perspektif. Bencana membawa korban untuk semua manusia, namun penanganan bencana hanya menysasar kepada laki-laki dewasa. Sebagaimana terjadi pada kehidupan sehari-hari, perempuan dan kelompok rentan adalah kelompok yang tidak mendapat akses dan ruang yang cukup di ranah publik. Karenanya ketika terjadi bencana pun, publik seakan-akan melupakan mereka.

Sebagian kecil lembaga kemanusiaan, baik internasional maupun nasional, mulai menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan penyintas bencana di Indonesia. Salah satunya yang dikembangkan oleh JMK di Pasigala (Palu, Sigi, Donggala) yang didukung oleh Oxfam, lembaga internasional yang telah berpengalaman dalam penanganan penyintas bencana di berbagai negara.

Program atau proyek JMK Oxfam yang dikembangkan di Pasigala untuk pemulihan bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi pada 28 September 2018, adalah sebuah proyek yang dimulai Oktober 2018 sampai September 2020 yang dibagi ke dalam tiga tahap. Tahap pertama berlangsung Oktober 2018 sampai Maret 2019, tahap kedua April-September 2019, dan tahap ketiga Oktober 2019 sampai September 2020. Program ini menjangkau penerimaan manfaat yang cukup besar dan dari semua unsur di dalam masyarakat.

Pada tahap respons tanggap darurat JMK di bawah pimpinan Oxfam melakukan kegiatan pada 3 sektor utama yakni WASH, *Livelihood* dan Gender *Protection* bagi 200.000 orang yang terdampak. Pada tahap ini tingkat kerentanan masyarakat masih sangat tinggi sehingga semua pihak masih fokus pada tanggap darurat dan perlu penanganan lanjutan untuk pemulihan.

Pada tahap kedua dan ketiga adalah tahap pemulihan, di mana JMK sebagai sebuah konsorsium yang didukung Oxfam fokus pada peningkatan masyarakat untuk ketangguhan dan keberlanjutan. JMK mendorong hadirnya konsorsium bersama dengan semua anggota JMK khusus untuk mendukung dan melanjutkan kerja pemulihan Pasigala

(Provinsi Sulawesi Tengah). Dari 23 lembaga yang tergabung di dalam JMK ada 15 lembaga yang mengikatkan diri dan ingin berkontribusi melalui kompetensi yang dimiliki untuk memberikan dampak lebih pada proses keberlanjutan dan penguatan masyarakat dalam masa pemulihan ini. Untuk itu JMK bersepakat menunjuk lembaga lokal (PKBI Sulawesi Tengah dan LBH APIK Sulawesi Tengah) menjadi *Lead*/Sekretariat untuk mengkoordinasikan kerja-kerja kemanusiaan ini di Sulawesi Tengah. Pada fase dua LBH APIK Sulawesi Tengah ditunjuk sebagai sekretariat, sedangkan pada fase 3 oleh PKBI Sulawesi Tengah. Ini sebagai upaya dan bentuk untuk mendorong dan mempromosikan prinsip dan praktik kepemimpinan lokal dalam kemanusiaan (*local humanitarian leadership*).

Program ini hendak mencapai 4 tujuan jangka panjang (*outcomes*), yaitu: (1) Meningkatnya akses yang setara terhadap air bersih, sanitasi, dan kebersihan; (2) Meningkatnya keberlanjutan mata pencaharian masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal dan ketahanan pangan; (3) Meningkatnya kesadaran dan memastikan pengarusutamaan kesetaraan gender, perlindungan dan inklusi disabilitas; dan (4) memperkuat kapasitas OMS lokal dalam membangun ketahanan masyarakat.

Program ini memperkuat mata pencaharian (*livelihood*), kesetaraan akses pada air, sanitasi dan hygiene (WASH), serta pengarusutamaan (*mainstreaming*) gender dan disabilitas. Penguatan dan pendekatan perspektif gender, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya ditempuh dengan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas dari kelompok-kelompok tersebut untuk inklusivitas dalam program, yang memengaruhi pembentukan inklusi sosial.

2

KETANGGUHAN DAN KEBERLANJUTAN



Kekuatan NGO adalah kaya metode dan inovasi dalam mendorong keberdayaan.

Namun, inovasi itu harus menjadi bagian dari sistem pembangunan pemerintah untuk keberlanjutan.

DINO ARGIANTORO,
Humanitarian Lead Respons Oxfam

Bencana alam adalah peristiwa yang dapat diprediksi, diukur, dan dapat dikurangi resiko dan dampaknya. Masyarakat yang hidup di daerah rawan bencana disiapkan untuk selalu siap siaga dalam menghadapi bencana. Program Membangun Ketangguhan Bencana Pasigala adalah salah satu yang menyiapkan masyarakat tangguh dalam menghadapi bencana. Program ini fokus pada jangka panjang dengan menguatkan dan menyiapkan masyarakat berdaya dan siap siaga

menghadapi bencana. Beberapa pembelajaran penting dapat dipetik dari Program Membangun Ketangguhan Bencana Pasigala.

A. Lokalitas

Lokalitas atau pemanfaatan sumber daya lokal, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam merupakan pembelajaran dan faktor penting dalam program ini. Dengan memanfaatkan potensi yang ada pada masyarakat dan



JMK memperkuat lokalitas. (Foto: Degin Adenessa)

sumber daya alam yang tersedia, beberapa keuntungan, baik jangka pendek maupun jangka panjang telah dijejakkan.

Selama ini, sebagian besar pelaksana program/proyek masih menjadikan wilayah dan masyarakat sebagai obyek dan penerima manfaat. Sarana dan prasarana program/proyek selalu didatangkan dari luar, bahkan dari luar negeri. Praktik seperti ini selain mematikan inisiatif dan sumber daya lokal, di sisi lain juga potensial menjadi program/proyek yang tidak berkelanjutan. Masyarakat atau penerima manfaat sering menilainya sebagai program/proyek orang luar. Berikut beberapa pembelajaran dari Program Membangun Ketangguhan Bencana Pasigala yang mengedepankan lokalitas.

Pertama, beri kesempatan dan kepercayaan. Program ini dikerjakan oleh seratus persen sumber daya manusia lokal yang bergabung di dalam JMK. JMK menggaransi dan menjamin program ini dapat dilaksanakan dengan baik, karena sumber daya di JMK yang beragam sangat mumpuni dengan pengalaman yang cukup panjang. Di Palu, PKBI Sulawesi Tengah dan LBH APIK Sulawesi Tengah sebagai sekretariat dan pengendali wilayah.

Di tingkat lapangan, yakni sumber daya yang setiap saat berinteraksi dengan masyarakat, seperti volunteer dan CO adalah warga Pasigala. CO adalah warga setempat, di desa atau kelurahan setempat yang mengenal memahami budayaarganya.

Dengan mengadakan kemampuan dan potensi lokal, program ini menunjukkan keberhasilan yang baik, dilihat dari respon pemerintah, penerima manfaat, dan media massa. “Beri kepercayaan dan kesempatan kepada potensi dan sumber daya yang ada, nanti kita lihat hasilnya” komentar Dino Argianto dari Oxfam.

Kedua, mudah membangun kepercayaan. Orang-orang lokal lebih mudah membangun hubungan dan kepercayaan dengan penerima manfaat dan pemerintah setempat. Tidak ada sekat antara pelaksana program, pemerintah, dan penerima manfaat. Amirah, seorang CO Kelurahan Duyu yang membantu assesmen (penilaian) bersama I fon, WASH-PHP *Officer* mampu meyakinkan lima keluarga untuk membangun sebuah toilet atau WC secara komunal. Amirah menyatakan “warga menjadi percaya dan merasa bahwa WC itu kan untuk kepentingan mereka dan diyakinkan oleh orang-orang yang mereka kenal.”

Cerita mengenai WC menjadi menarik bagi tim PHP dalam mendobrak kebiasaan masyarakat dalam proses penyadartahuan lima pilar STBM di 33 desa intervensi. Salah satunya terkait dengan Stop Buang Air Sembarangan. Mengubah kebiasaan terkait dengan buang air di sembarangan tempat tidak mudah, apalagi ini sangat privasi dan berhubungan dengan berbagai faktor. Komunikasi menjadi kunci dari strategi untuk mengenalkan WC komunal tersebut, dan itu lebih mudah dilakukan oleh orang-orang lokal.

Ketiga, biaya yang lebih kecil. Program/proyek yang menggunakan orang-orang lokal sudah pasti lebih murah dari sisi biaya. Biaya operasional biasanya sangat besar bila tim pelaksana adalah orang-orang yang didatangkan dari luar, karena berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Tenaga dari luar untuk program ini hanyalah orang-orang yang mempunyai kemampuan spesifik yang dibutuhkan untuk melakukan *technical assistance*.



Menjaga hubungan baik dengan pemerintah. (Foto: Deginia Adenessa)

B. Tidak Memulai dari Awal

Banyak sekali program yang dilakukan oleh NGO/OMS selalu dimulai dari riset atau minimal penilaian cepat atau assesmen (assessment). Itu berarti program dimulai dari awal atau dari nol. Program yang dilakukan di Pasigala menggunakan data resmi dari pemerintah, yaitu data Dinas Sosial, BPS, data kecamatan, dan desa/kelurahan.

Selanjutnya data yang ada diverifikasi untuk memastikan data tersebut valid. Tahap berikutnya dilakukan uji publik selama 3 hari, di mana data penerima manfaat dibuka kepada masyarakat untuk klarifikasi dan perbaikan. Data penerima manfaat dan data-data lain yang digunakan dalam program selanjutnya disepakati warga.

Ini adalah pembelajaran yang sangat baik untuk tiga hal. **Pertama**, menggunakan data resmi pemerintah untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah, namun harus tetap melakukan verifikasi dan validasi. **Kedua**, sebagai bentuk transparansi yang harus diterapkan oleh semua pihak, dan **Ketiga** pelibatan warga sejak awal untuk menjaga kekompakan warga, sekaligus menghindari permasalahan-permasalahan yang timbul.

C. Kelompok Berisiko/Rentan

Program ini menjangkau kelompok berisiko/rentan yang luas, yaitu perempuan kepala keluarga, anak, disabilitas, ibu hamil, ibu menyusui, lanjut usia, dan minoritas lainnya. Kelompok-kelompok tersebut paling berisiko ketika terjadi bencana. Namun dalam penanganan korban bencana, semua orang dianggap sama, padahal kelompok berisiko/rentan membutuhkan penanganan dan kebutuhan yang berbeda. Ketika semua orang dianggap sama, maka akan memunculkan pengabaian terhadap kelompok-kelompok berisiko/rentan. Intinya, program ini tidak meninggalkan seorang pun di dalam wilayah bencana.

Setidaknya terdapat dua pembelajaran penting dalam program ini terkait dengan jangkauan kelompok berisiko/rentan yang luas. **Pertama**, program bersifat inklusif, yang menjangkau semua masyarakat dan menempatkan semua manusia dalam posisi yang setara. Namun, kebutuhan setiap orang berbeda sesuai dengan kondisinya. Kelompok-kelompok berisiko/rentan mempunyai akses yang terbatas karena berbagai faktor, karenanya perlu diakomodasi dan dipenuhi kebutuhan spesifiknya.

Kedua, program ini membuka akses untuk kelompok disabilitas. Hadida atau akrab dipanggil Mama Reza, seorang disabilitas netra menceritakan, setelah mengikuti pertemuan kelompok disabilitas, dia baru tahu ternyata jumlah orang yang menyandang disabilitas cukup banyak dan tidak perlu malu atau merasa rendah diri dengan kondisi yang dialaminya. "Program ini responsif terhadap kelompok berisiko/rentan, termasuk disabilitas, sehingga akan menjadi pembelajaran yang bagus untuk lembaga-lembaga pelaku pembangunan, terutama untuk pemerintah." Komentar Jumaya, salah satu pengurus HWDI Sulawesi Tengah.

D. Masyarakat Tangguh

Program ini menyiapkan masyarakat untuk hidup di daerah rawan bencana. **Pertama**, menyiapkan masyarakat siap siaga menghadapi bencana. Pembentukan KSB (Kampung Siaga Bencana) adalah satu cara menyiapkan masyarakat selalu siap ketika terjadi bencana. Purbadiansyah, pengurus KSB Desa Toaya, Sindue, Donggala menyatakan, KSB menyiapkan semua masyarakat untuk selalu siap ketika terjadi bencana sehingga mengurangi resiko. Penduduk di semua umur harus



JMK menyiapkan masyarakat tangguh. (Foto: Degina Adenessa)

mengetahui tanda-tanda terjadinya bencana dan tahu jalur-jalur untuk penyelamatan.

Kedua, masyarakat menghadapi bencana secara rasional. Bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi adalah bencana alam yang selalu terjadi karena pergerakan lempeng bumi, tidak ada hubungannya dengan kesalahan dan dosa siapa pun. Karena itu, masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan bencana berbasis kearifan lokal (*local knowledge*) dan pengetahuan moderen.

E. Keberlanjutan

Ada budaya buruk di negeri ini, mudah lupa. Orang-orang yang selamat dari bencana hanya sekedar menceritakan kepada anak cucunya mengenai bencana yang dialaminya. Cerita juga berkisar pada kehebatan untuk menyelamatkan diri yang dibumbui dengan berbagai mitos. Cerita tidak banyak memberi pelajaran pada anak cucu untuk menjadi orang-orang yang siap siaga di daerah rawan bencana.

Program ini mendorong dan mengubah beberapa hal yang menjadikan program ini akan tetap berada di masyarakat dan pemerintah.

Pertama, menjadikan bencana sebagai pengetahuan dan ingatan komunal. Program ini menguatkan masyarakat Pasigala mengenai bencana dan tangguh dalam menghadapi bencana, melalui berbagai kegiatan, termasuk advokasi agar pengetahuan dan mitigasi bencana menjadi kebijakan pemerintah.

Kedua, memfasilitasi dan mendorong inisiatif lokal. Program ini telah mengandalkan sumber daya lokal, termasuk memfasilitasi inisiatif lokal di masyarakat untuk dikembangkan. Beberapa kelompok usaha kecil di masyarakat, seperti kelompok tukang jahit, pembuat kue dan olahan hasil perikanan adalah kelompok yang difasilitasi dan diperkuat untuk berkembang.

Ketiga, menjadikan praktik-praktik baik sebagai kebijakan dan program pemerintah. KSB dan pembuatan WC komunal adalah program/kegiatan baik yang di beberapa desa telah diadopsi atau menjadi program pemerintah desa.

Keempat, adaptasi dengan perubahan. Walaupun masih dalam jumlah kecil, petambak garam di Talise, Palu telah menggunakan teknologi geomembran untuk meningkatkan produksi garam dan menghasilkan garam berkualitas tinggi. Kelompok-kelompok usaha dan kegiatan juga dikenalkan pemasaran secara daring (dalam jaringan) atau *online* untuk menjangkau pembeli lebih luas.

3

MENGUATKAN PENYINTAS

Penyintas bencana harus tetap melanjutkan kehidupannya, dengan melakukan aktivitas dan mata pencahariannya. Namun, untuk bangkit dan beraktivitas tidak mudah. Penyintas membutuhkan dukungan dari pihak lain untuk bangkit, terutama tahap awal. Apalagi bagi penyintas yang sarana produksinya hilang atau rusak karena bencana.

Program JMK Oxfam di Pasigala menstimulasi kebangkitan ekonomi penyintas melalui berbagai kegiatan dan dukungan dana. Program juga menguatkan penyintas untuk beradaptasi dengan bencana dan setiap perubahan yang selalu terjadi.

A. Bertanam Sayur di Pinggiran Kota

Mereka yang selamat dari bencana maupun mereka yang terdampak bencana harus melanjutkan kehidupannya. Dukungan dari berbagai pihak menjadi energi baru bagi penyintas untuk bangkit. Program Membangun Ketangguhan Bencana Pasigala memberi beberapa



Teman-teman dari program tidak sekedar datang memberi bantuan, tetapi juga mendukung dan meyakinkan bahwa, kami harus bekerja untuk kehidupan kami dan untuk kehidupan orang lain

ABDUL MAJID
Petambak Garam

pelajaran dalam memperkuat penyintas di sektor mata pencaharian (*livelihood*).

Burhanuddin (45 tahun), petani sayur yang bangkit setelah bencana mendapat berkah karena bertemu dengan program JMK Oxfam. Pak Bur—nama akrab Burhanuddin—bersama kelompoknya saat ini telah memproduksi beberapa jenis sayur dan dipasok ke berbagai pasar, hotel, restoran, dan rumah makan di Kota Palu. Menurutnya, anggota kelompoknya tidak mampu memasok permintaan yang cukup tinggi, walaupun produksi mereka juga sudah meningkat hingga mencapai 150-200 persen.

Peningkatan produksi sayur mereka mengalami peningkatan cukup tinggi setelah kelompoknya mendapat subsidi mesin pembajak tanah dan modal produksi dari program JMK Oxfam. Pak Bur dan anggota kelompoknya adalah petani sayur sudah sejak lama. Produksi mereka terhenti total, karena beberapa petani menjadi korban bencana. Bahkan beberapa petani baru mulai menggarap kembali tanahnya pada akhir tahun 2019 dan awal 2020.

Pak Bur dipercaya menjadi Ketua Kelompok Tani Taiparangi yang awalnya beranggotakan 13 orang, kemudian 7 petani bergabung sehingga menjadi 20 orang. Kelompok ini mendapat subsidi mesin pembajak dari program serta biaya produksi sebesar Rp 2.500.000, yang dicairkan dalam dua tahap, masing-masing Rp 1.600.000 dan Rp 900.000. Biaya produksi ditransfer melalui bank, yang bertujuan untuk dua hal. Pertama, transparansi bagi kelompok untuk menghindari berbagai cerita kurang baik yang dapat mengganggu soliditas kelompok. Kedua, mendekatkan anggota kelompok pada sistem perbankan, baik untuk menghindari anggota kelompok dengan rentenir maupun mendorong petani untuk menabung atau menyimpan uang di bank.

Menurut Pak Bur, program dari JMK Oxfam telah membangkitkan kembali petani sayur di pinggiran Kota Palu. Sebagian petani sayur baru mulai menggarap lahannya setelah mendapat dana stimulan dari program, sebagian petani baru tergerak menggarap lahannya setelah melihat petani yang lainnya memanen sayur.

Dukungan program berupa mesin pembajak dan dana stimulan sangat berarti bagi petani sayur. Mesin pembajak digunakan secara bergiliran di

dalam kelompok. Setiap anggota menyediakan bahan bakar dan dikenakan biaya perawatan sebesar Rp 25.000/hari yang disimpan di dalam kas kelompok. Dana tersebut akan digunakan sewaktu-waktu bila dibutuhkan, termasuk membeli mesin pembajak yang baru jika mesin dari JMK Oxfam tidak berfungsi optimal lagi.

B. Tambak Garam Talise

Abdul Majid (42 tahun)—biasa dipanggil Majid—adalah petambak garam asal Pasuruan, Jawa Timur, yang berpindah ke Palu tahun 2005 dan mulai menjadi petambak garam di Talise, Palu tahun 2007. Majid mulai menyewa lahan untuk memproduksi garam, sekaligus menjadi pengepul garam, hingga akhirnya mempunyai lahan sendiri. Kehidupan Majid sudah cukup baik sampai bencana memorak-porandakan tambak garam di Talise, termasuk merenggut nyawa beberapa temannya.

Majid selamat dari bencana. Gelombang tsunami menyeret Majid sejauh sekitar 200 m, namun dirinya terselamatkan oleh pohon. Dalam kondisi hampir putus asa melihat lahan tambak yang hancur dan penuh sampah, Majid balik ke Jawa selama 2 bulan dan bekerja di tambak garam keluarga



Tambak garam Talise yang mulai berproduksi. (Foto: Degina Adenessa)

di Pasuruan. Majid kembali ke Palu pada Desember 2018, yang kemudian menjadi penggerak bangkitnya petambak garam Talise.

Menurut Majid, awal tahun 2019 JMK Oxfam membawa harapan bagi petambak garam. Program ini tidak hanya membawa bantuan bagi petambak untuk kembali mengolah lahan tambak, tetapi juga membawa semangat dan dukungan moral. Majid dan petambak garam lainnya mulai bersemangat untuk bangkit karena mendapat dukungan dari pihak lain. Ada hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa, semangat penyintas untuk bangkit tidak melulu soal biaya dan peralatan produksi, tetapi juga soal dukungan semangat dan moral dari staf program (CO dan volunteer). Menurut Majid, teman-teman dari JMK Oxfam tidak sekadar datang memberi bantuan, tetapi juga mendukung dan meyakinkan bahwa, kami sebagai petambak garam harus bekerja untuk kehidupan kami dan untuk kehidupan orang lain.

Program JMK Oxfam memasok peralatan yang digunakan petambak untuk membersihkan lahan dan menatanya kembali, berupa sekop untuk menggali tanah dan arko untuk mengangkut pasir. Bantuan lainnya berupa pompa air, pipa, dan papan untuk membuat petak-petak tambak.

Awalnya hanya empat orang yang tertarik untuk kembali mengolah tambak garam. Majid bersama tiga rekannya bergotong rotong membersihkan sampah, menata tambak, dan memperbaiki saluran air. Petambak lainnya baru mulai kembali membersihkan dan menata tambaknya setelah melihat empat petambak yang dimotori oleh Majid mulai berproduksi.

Sampai akhir tahun 2020 terdapat 16 kelompok petambak garam atau sekitar 160 orang, yang setiap kelompoknya beranggotakan 8-11 orang. Setiap petambak juga mendapat dana stimulan untuk produksi sebesar Rp 2.500.000/orang yang dicairkan dalam dua tahap, tahap pertama sebesar Rp 1.600.000, dan tahap kedua sebesar Rp 900.000. Dana stimulan sebagai biaya produksi ditransfer melalui bank.

Majid sebagai pelopor bangkitnya petambak garam di Talise juga telah mengikuti pelatihan produksi garam dengan teknologi geomembran yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui JMK Oxfam, Majid menularkan pengetahuannya kepada petambak lainnya, sehingga teknologi geomembran mulai dikenal dan digunakan oleh

petambak garam di Talise. Menurut Majid, teknologi geomembran menghasilkan garam kualitas tinggi dan meningkatkan produksi 2-3 kali lipat dibandingkan teknologi konvensional.

Program ini mengenalkan teknologi baru yang memungkinkan petambak garam dapat meningkatkan produksinya, sekaligus menghasilkan garam berkualitas tinggi. Petambak garam secara perlahan mengadopsi teknologi geomembran, yang suatu saat produksi garam dari Talise melimpah dengan kualitas tinggi, sehingga tidak diperlukan lagi pasokan garam dari luar Palu.

C. Menjahit Harapan

Bencana meluluhlantakkan rumah keluarga Winartin (47 tahun) rata dengan tanah, termasuk merusak mesin dan jahit dan berbagai peralatannya. Hal yang sama juga dialami oleh keluarga Megawati (36 tahun). Winartini, Megawati, dan perempuan lainnya yang berprofesi sebagai tukang jahit adalah contoh perempuan yang cepat pulih dan bangkit kembali pasca bencana untuk menjalankan usahanya.

Winartin dan Megawati yang tinggal di Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi berprofesi sebagai tukang jahit sejak lama. Winartini pernah menjadi TKI di Arab Saudi selama sekitar 10 tahun. Balik dari Arab Saudi, Winarti memulai usaha menjahit tahun 1997. Usaha menjahit yang menjadi tumpuan hidup keluarga itu berhenti total ketika terjadi bencana. Namun, Winartini dan beberapa tukang jahit di Desa Langaleso tidak meratapi kehancuran. Mereka bangkit kembali bersama dukungan Program JMK Oxfam.

Menurut Winartin, dia bersama dengan perempuan-perempuan yang berprofesi sebagai tukang jahit berusaha untuk menjalankan kegiatannya yang berhenti total karena bencana. Namun, kesulitan pertama adalah mendapatkan modal untuk membeli mesin jahit. Ketika mereka baru mulai bangkit, tidak mudah mendapatkan modal. Apalagi usaha menjahit harus dimulai dari nol karena semua sarana dan prasarana produksi rusak oleh bencana.

Program JMK Oxfam memberi harapan dengan mendistribusikan bantuan modal usaha untuk kelompok penjahit di Desa Langaleso dimulai pada Agustus 2019. Bantuan modal diperuntukkan untuk membeli mesin jahit, mesin obras, kain, dan perlengkapan lainnya. Bantuan modal ditransfer



Megawati, tukang jahit yang bangkit bersama Program JMK Oxfam. (Foto: Deginia Adenessa)

melalui bank dan peruntukannya harus diputuskan dalam kelompok dan diketahui oleh staf Program JMK Oxfam.

Beberapa kelompok menjahit terbentuk. Satu kelompok beranggotakan 23 orang, yang kemudian dibentuk lagi kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 7-9 orang untuk mengelola satu usaha. Winartini bersama tujuh anggota kelompoknya mulai menerima jahitan sejak September 2019 dengan Mukena adalah produk andalanya. Namun, maret 2020 usaha menjahit juga diterpa Covid-19, yang menyebabkan peralatan menjahit pun diistirahatkan.

Namun, usaha menjahit yang terhenti tidak berlangsung lama. Staf JMK Oxfam mendorong usaha menjahit memproduksi kebutuhan terkait dengan Covid-19, terutama masker, termasuk pesanan dari JMK Oxfam sebanyak 1.000 masker. Usaha menjahit pun mulai bangkit dengan datangnya pesanan masker dari beberapa pihak yang dipromosikan oleh JMK dan jaringannya.

Untuk meningkatkan kualitas jahitan, pengelolaan usaha, dan pemasaran, JMK Oxfam melakukan pelatihan-pelatihan terkait. Saat ini, usaha menjahit mulai berkembang, termasuk mendapat pesanan secara

online. Usaha menjahit yang dikembangkan oleh Winartini, Megawati, dan perempuan lainnya di Langaleso cukup adaptif terhadap perubahan dan kemajuan. Mereka tidak meratapi kondisi yang terjadi, tetapi selalu beradaptasi dengan perubahan. Mereka adalah penjahit harapan, penjahit masa depan. Benar kata Nining Rahayu dari LBH APIK Sulawesi Tengah bahwa, perempuan adalah kelompok rentan bencana, namun perempuan adalah kelompok yang paling cepat bangkit dan melihat peluang.

D. Laut Selalu Memberi

Untung (43 tahun) adalah nelayan yang telah menangkap ikan sejak lama dengan alat tangkap sero. Nelayan yang tinggal di Desa Toaya Vunta, Sindue, Donggala ini mendapat berkah dari Program JMK Oxfam. Pada saat bencana, Untung tidak menjadi korban langsung dari bencana, tetapi menjadi korban tidak langsung dari bencana tersebut.

Setelah bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi menerpa Pasigala, tidak ada nelayan yang berani melaut selama beberapa pekan, bahkan ada nelayan yang tidak melaut hingga 2 bulan. Menurut Untung, nelayan selalu dihantui dengan gempa dan tsunami susulan. Karena tidak melaut dalam waktu lama, beberapa peralatan penangkapan yang dipasang menetap di laut, seperti sero, mengalami kerusakan atau hilang.

Untung dan nelayan yang lain mulai memperbaiki alat tangkapnya ketika melihat harga ikan di Donggala sangat mahal karena minimnya pasokan. Seiring dengan itu, Program JMK Oxfam juga menyasar nelayan sebagai penerima manfaat menjadi harapan bagi Untung dan kawan-kawannya. Peralannya, sebelumnya Untung dan teman-temannya telah mengusulkan proposal kepada beberapa lembaga, namun belum mendapat respon.

“JMK Oxfam tidak hanya melihat mereka yang menjadi korban, seperti rumah rusak, tetapi juga seperti saya yang terdampak karena bencana. Rumah saya memang tidak rusak, tapi saya juga tidak berani melaut karena takut terjadi tsunami lagi, sehingga alat tangkap terlantar dan rusak.” Ungkap Untung menjelaskan bahwa dirinya juga menjadi salah satu penerima manfaat dari sektor *livelihood* Program JMK Oxfam.

Untung dan kelompoknya telah membeli 8 perahu berukuran besar dan 4 perahu berukuran kecil, mesin, dan lampu dari dana yang stimulan



Nelayan dengan bantuan perahu Program JMK Oxfam. **(Foto: Degina Adenessa)**

Program JMK Oxfam. Perahu besar dioperasikan oleh 8-9 orang dalam penangkapan ikan teri, sedangkan perahu kecil digunakan oleh 1 orang untuk menangkap ikan dengan pancing ulur atau pancing tonda.

Sebagian besar nelayan di Desa Toaya adalah penangkap ikan teri dengan alat tangkap sero. Nelayan yang lainnya menangkap ikan-ikan dasar dengan pancing ulur dan menggunakan perahu berukuran kecil. Hasil tangkapan ikan teri tidak sulit dipasarkan, baik di Palu maupun Donggala. Hasil tangkapan langsung dijual kepada pengepul yang memasok ke pasar atau kepada pengolah untuk memproduksi ikan teri kering.

Dana stimulan dari Program JMK Oxfam berhasil meningkatkan pendapatan Untung dan kelompoknya, sehingga mereka telah merencanakan untuk meningkatkan kapasitas alat tangkap dan kapal dari uang yang disisihkan oleh kelompok. Menurut Untung, Program JMK Oxfam sangat membantu nelayan untuk bangkit kembali, termasuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan, yang kemudian mendorong nelayan untuk meningkatkan kapasitas alat tangkap, karena laut masih cukup memberi harapan.

4

MENGUBAH KEBIASAAN UNTUK HIDUP SEHAT

Rumah keluarga Nirmala (40 tahun) sederhana, namun ukurannya lebih luas dibandingkan rumah-rumah tetangganya. Di belakang rumah tersebut sementara dibangun jamban, toilet atau WC, yang akan digunakan oleh keluarga Nirmala dan empat rumah tetangga. Empat rumah tetangga tersebut berada di sebelah kanan, kiri, dan belakang rumah keluarga Nirmala.

Pembangunan jamban komunal dilakukan secara swadaya oleh keluarga Nirmala dan empat keluarga tetangganya, sedangkan pipa dan dudukan kloset dibantu oleh Program JMK Oxfam. Tanah yang ditempati untuk jamban adalah tanah milik keluarga Nirmala. Dengan begitu, keluarga Nirmala berkontribusi paling besar untuk pembangunan jamban tersebut. Namun, bagi Nirmala, tidak masalah dengan tanahnya yang digunakan untuk pembangunan jamban bersama. Selain dapat bernilai ibadah, jika dia sendiri yang membangun jamban tentu lebih berat, dan mungkin belum ada rencana untuk membangun



Mengubah perilaku itu kan tidak mudah dan butuh waktu. Karena itu, kami memberdayakan masyarakat dengan cara memicu, ada masyarakat yang tertarik dan melakukan, tetapi ada yang menunggu contoh.

IFON, WASH-PHP Officer



Pelatihan komite air dan sanitasi. (Foto: Degina Adenessa)

jamban sendiri. Demikian juga bila suatu saat jamban butuh perbaikan maka akan ditanggung bersama sehingga lebih ringan.

Nirmala dan empat tetangganya yang membangun jamban bersama bukanlah sesuatu yang mudah. Menurut Amirah, CO di Kelurahan Duyu yang membantu assesmen (penilaian) dan bertugas mendorong pembangunan jamban komunal di Kota Palu, bahwa Program JMK Oxfam hanya memicu, maka untuk menyakinkan warga membangun jamban, cara yang ditempuh adalah dilakukan penyadaran mengenai hidup sehat. Masyarakat perlu sadar bahwa BAB (Buang Air Besar) di sembarangan tempat, termasuk di jamban-jamban cemplung sangat berbahaya karena akan mengancam kesehatan warga.

Mengubah kebiasaan warga agar tidak BAB di sembarangan tempat, tentu dengan menyediakan jamban. Namun, warga harus sadar bahwa jamban adalah kebutuhan mereka untuk hidup sehat. Membangun rumah, juga membangun jamban. Rumah yang sehat harus memiliki jamban yang memenuhi standar kesehatan.

Karena itu, Program JMK Oxfam sektor WASH (*Water Sanitation and Hygiene*) dan PHP (*Public Health Promotion*) mendobrak kebiasaan masyarakat dalam proses penyadaran di 33 desa intervensi di Pasigala. Staf program bekerjasama dengan Puskesmas setempat dan Kader PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) untuk mempromosikan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang merupakan program pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan). Lima Pilar STBM adalah :

1. Stop buang air sembarangan;
2. Cuci tangan pakai sabun;
3. Pengelolaan air minum dan makanan;
4. Pengelolaan sampah;
5. Pengelolaan limbah cair.

STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan. Tujuannya untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pilar STBM yang pertama adalah Stop Buang Air Sembarangan. Ketika warga ditanyakan, mengapa buang air di sembarangan tempat, akan dijawab karena tidak ada jamban. Jika ditanyakan, mengapa tidak membuat jamban di rumah. Ada warga yang menjawab, karena tidak tersedia cukup air. Namun, warga yang di daerahnya tersedia cukup air juga tidak mempunyai jamban dan membuang air di sembaran tempat, termasuk pada sumber air seperti sungai dan genangan air lainnya.

Rosdiah (51 tahun), kader PHBS Desa Toaya Vunta menjelaskan sebagai berikut: “masih banyak warga yang buang air di sembarangan tempat karena tidak punya WC, bukan karena mereka tidak mampu membangun WC, tetapi karena terbiasa membuang air di sembarangan tempat sejak lama, sehingga tidak menganggap penting WC. Mereka juga tidak tahu dan tidak sadar bahwa buang air di sembarangan tempat akan menimbulkan penyakit yang akan membahayakan dirinya dan orang lain. Karena itu, memang dibutuhkan sosialisasi dan penyadaran terus-menerus, termasuk dengan contoh, seperti yang dilakukan JMK Oxfam dalam mengenalkan pembangunan satu WC untuk beberapa rumah. Dari di situ bisa ditiru oleh yang lain, sehingga jumlah orang yang buang air sembarangan akan berkurang.”



Pelatihan membuat dudukan WC sesuai standar. (Foto: Degina Adenessa)

Program JMK Oxfam mengenalkan Wirausaha Sanitasi, yaitu mengajak warga dan pemerintah desa untuk memastikan indikator dan tujuan STBM tercapai terutama yang berkaitan dengan stop buang air besar sembarangan dan semua orang punya jamban. Dan semua orang punya jamban ini, tidak harus masing-masing rumah mempunyai jamban, tetapi jamban dapat dibangun secara komunal, tergantung kesepakatan dan kesanggupan masyarakat.

Pembuatan jamban secara komunal setidaknya membawa beberapa keuntungan. Pertama, secara teknis-ekonomis, pembuatan jamban lebih murah, mudah, dan cepat, karena ditanggung oleh beberapa keluarga. Kedua, secara sosial-budaya, hidup bersama dan gotong royong dibangkitkan dan dipelihara melalui jamban komunal. Ketiga, dari sisi kesehatan, mengubah kebiasaan masyarakat untuk hidup lebih sehat.

Program JMK Oxfam juga membangun infrastruktur untuk WASH, terutama air bersih, yang dilakukan oleh tim PHE (*Public Health Engineering*). Pengelolaan infrastruktur air bersih dilakukan oleh Komite Air di tingkat



Salah satu infrastruktur air yang dibangun JMK Oxfam. (Foto: Degina Adenessa)

desa. Ketersediaan air bersih yang cukup diharapkan mempercepat pencapaian pilar STBM. Karena, faktor air sering menjadi penghambat bagi kebiasaan hidup bersih dan sehat.

Jamban dan air selalu dihubungkan dengan faktor kebersihan dan kesehatan. Namun, jamban dan air juga terkait dengan soal perempuan dan anak. Jamban adalah “rumah kecil” yang dapat melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan dan perundungan. Perempuan dan anak perempuan tentu lebih sulit jika buang di sembarangan tempat. Karena itu, keluarga yang mengusahakan pembuatan jamban adalah keluarga yang peduli dan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan.

Sedangkan air adalah satu kebutuhan vital manusia, yang selalu diusahakan dan disediakan oleh perempuan dan anak. Jika sumber air berada jauh dari pemukiman, maka beban perempuan dan anak menjadi bertambah, karena perempuan dan anak selalu menjadi penyedia air. Jumlah laki-laki yang mengambil air di tempat-tempat umum lebih sedikit

dibandingkan perempuan dan anak, namun umum terjadi, ketika masyarakat membicarakan, perempuan jarang dilibatkan.

Program Membangun Ketangguhan Bencana Pasigala yang dilaksanakan JMK Oxfam menempatkan WASH dan PHP sebagai faktor penting. Masyarakat yang sintas dari bencana dan membangun ketangguhan bencana, di dalamnya termasuk menjadikan masyarakat hidup sehat. Sektor WASH dan PHP menguatkan dan memberdayakan masyarakat untuk mengubah pola hidup bersih dan sehat, dengan tetap bertumpu pada kekuatan dan potensi lokal.

Pengenalan jamban komunal yang memenuhi standar kepada masyarakat bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat. Karena jamban cemplung di beberapa desa juga dibangun secara komunal, hanya tidak memenuhi standar kesehatan.

Menurut Nirmala, orang yang buang air di sembarangan tempat sebenarnya malu, apalagi kalau itu di tanah milik orang atau di kebun orang, tapi itu menjadi kebiasaan karena orang tidak membuat WC di rumah, dan selalu menganggap WC itu mahal. Jadi kalau ada WC yang dibangun bersama itu jadi mudah dan tidak berat.

Program JMK Oxfam juga membangun infrastruktur untuk WASH. Pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi dilakukan oleh tim PHE pada 29 desa dari 33 desa dampingan JMK Oxfam. Mulai dari pembangunan jaringan air bersih baru di tujuh desa, yakni sebanyak 101 infrastruktur air. Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas sanitasi jamban di 21 desa sebanyak 361 unit, dan jaringan air bersih yang lama (fasilitas dari fase dua yang belum selesai).

Terkait dengan kebutuhan dan keberlanjutan sektor livelihood, terutama pada usaha atau bidang yang membutuhkan air, maka sektor WASH juga memberi dukungan melalui pembangunan infrastruktur air kepada kelompok-kelompok usaha dampingan sektor livelihood pada 18 desa sebanyak 76 infrastruktur air.

Tentu dalam proses pembangunan infrastruktur air yang dilakukan oleh sektor WASH juga memperhatikan berbagai hal, termasuk keterlibatan perempuan dan kelompok rentan. Air adalah faktor vital dalam kehidupan, di mana semua manusia harus mempunyai akses yang setara. Karena itu,



JMK OXFAM mengajari anak-anak di Desa Ape Maliko, Kabupaten Donggala cara mencuci tangan yang sehat.. (Foto: Degina Adenessa)

kelompok perempuan dan kelompok rentan juga terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan dalam pengadaan dan pengelolaan air. Perempuan dan kelompok rentanlah yang paling banyak mengakses air, dan semua orang berhak untuk menyuarakan pendapatnya agar kebutuhan air terpenuhi secara setara. Hal ini penting untuk meningkatkan kesetaraan akses penggunaan air bersih sekaligus mendekatkan air bersih kepada penerima manfaat.

5

MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN



Perempuan adalah kelompok rentan bencana, namun perempuan adalah kelompok yang paling cepat bangkit dan melihat peluang.

NINING RAHAYU
LBH APIK Sulawesi Tengah

Pada kondisi tanpa bencana, perempuan adalah kelompok yang berisiko atau kelompok rentan. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender menempatkan perempuan dalam kondisi rentan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun negara. Kerentanan makin meningkat pada perempuan-perempuan yang menyandang kategori khusus, di antaranya perempuan disabilitas, anak perempuan, perempuan

lanjut usia, perempuan kepala keluarga, ibu menyusui, ibu hamil, dan kelompok minoritas lainnya.

Dalam masyarakat dan budaya patriarki, perempuan menempati posisi lebih rendah atau jenis kelamin kedua setelah laki-laki, sehingga perempuan dikuasai oleh laki-laki. Di dalam masyarakat patriarki, hubungan laki-laki dan perempuan adalah hubungan kekuasaan dan hubungan transaksi. Posisi yang rendah dan hubungan kekuasaan bukan terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui proses pembelajaran, pembiasaan, dan transformasi yang

berkepanjangan, sehingga kehidupan yang mendiskriminasi dan merendahkan perempuan diterima sebagai kebiasaan dan kewajaran.

Kekerasan terhadap perempuan, terutama di ranah domestik, dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Perempuan yang mengalami kekerasan, bahkan disalahkan dan distigma sebagai perempuan yang tidak patuh dan tidak benar. Karenanya, kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai peristiwa biasa saja, bukan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

A. Perempuan Penyintas Bencana

Jika kondisi tanpa bencana atau kondisi normal, perempuan berada dalam kondisi rentan, maka jika terjadi bencana, perempuan lebih rentan dari laki-laki. Ketika hendak menyelamatkan diri, perempuan tidak hanya menyelamatkan dirinya, tetapi juga anak-anaknya dan orang-orang lain di dalam rumah. Perempuan-perempuan dalam kondisi hamil akan sangat berisiko, termasuk risiko keguguran atau melahirkan prematur. Ketika menjadi pengungsian, ibu hamil mengalami risiko kurang gizi karena asupan gizi yang tidak memadai dan tidak memenuhi standar gizi yang



Perempuan, tetap produktif di usia lanjut. (Foto: Degina Adenesa)

berkecukupan, yang akan berdampak pada melahirkan anak yang berat badannya kurang, anak kurang gizi, maupun stunting.

Ketika berada di lokasi penampungan, pengungsian, atau hunian sementara, perempuan diabaikan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya yang spesifik. Hunian yang tidak aman untuk perempuan dan anak, akses air bersih yang minim, MCK yang tidak ramah perempuan, penerangan terbatas, dan sebagainya. Selain itu, hunian sementara yang dibangun tidak ramah terhadap pasangan suami-istri karena tidak ada ruang pemisah atau sekat, sehingga berdampak pada kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bantuan yang disalurkan dari berbagai pihak, baik oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah, juga tidak memerhatikan kebutuhan perempuan dan anak, sehingga sangat terbatas. Kebutuhan perempuan ketika haid, hamil, melahirkan, dan menyusui, sebagaimana juga kebutuhan bayi dan anak, tidak menjadi bagian penting dalam pengadaan dan distribusi bantuan.

Namun, dalam kondisi rentan dan serba kekurangan, perempuan adalah kelompok yang lebih cepat pulih dan bangkit dari bencana. Nining Rahayu dari LBH APIK Sulawesi Tengah menceritakan, pada hari keempat setelah bencana di Pasigala, beberapa perempuan membuat jajanan yang dijual di area pengungsian. Perempuan-perempuan tersebut melihat peluang dari banyaknya relawan yang membutuhkan minuman dan makanan ringan. Hasil dari menjual jajanan di area pengungsian ini digunakan oleh anak-anak sebagai uang jajan dan untuk rokok suami. Dalam kondisi yang sulit, perempuan masih produktif, termasuk membelikan rokok untuk suaminya yang saat itu tidak produktif.

Perempuan-perempuan penyintas bencana yang masih berada di hunian sementara tetap produktif. Hadida (51 tahun) yang akrab dipanggil Mama Reza, seorang perempuan penyandang disabilitas netra yang masih berada di hunian sementara. Dalam kondisi tidak melihat, Mama Reza memasak untuk suami dan anak-anaknya. Mama Reza juga mengupas dan memotong bawang dari sebuah UKM yang memproduksi bawang goreng di Kota Palu.

Sebelum bencana, Samini (50 tahun) bersama perempuan-perempuan di Desa Toaya Vunta adalah Kelompok Wanita Tani yang memanfaatkan

pekarangan rumah untuk menanam berbagai tanaman untuk konsumsi yang sisanya dijual, terutama sayur dan rempah-rempah. Pasca bencana, perempuan-perempuan penyintas itu memulai kembali usaha untuk menghidupi keluarga. Samini dan kelompoknya juga merambah ke usaha lain yang dianggap menguntungkan, yaitu membuat kue dan makanan sesuai pesanan. Samini dan kelompoknya mendapat dukungan dana untuk pengadaan peralatan dari JMK Oxfam. Menurut Samini, pendapatan kelompoknya tergolong kecil, tapi cukup mendukung kebutuhan keluarga.

Penjahit di Desa Langaleso, umumnya bangkit menjalankan usaha menjahit dari nol, karena semua peralatan menjahit mereka telah rusak ditimpa reruntuhan rumah saat bencana. Winartini, penjahit yang memulai usaha dari nol atas dukungan dari Program JMK Oxfam, sangat yakin bahwa usaha menjahit tetap mempunyai peluang untuk berkembang dan menjadi penyangga ekonomi keluarganya. Sekitar tujuh bulan, usahanya mulai berjalan, bencana baru menimpa lagi, pandemi Covid-19. Namun, Wirnatini dan kelompoknya tetap bisa menjalankan usaha dengan menjahit masker. Awal tahun 2021 usaha menjahit mulai tumbuh kembali, karena pesanan semakin bertambah.

Program JMK Oxfam mendukung usaha-usaha masyarakat yang berhubungan peningkatan pendapatan atau mata pencaharian (*livelihood*), baik yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Menurut Nuraida, *Livelihood Officer* Program JMK Oxfam, program mendukung dan memicu usaha-usaha penyintas untuk kembali beraktivitas dan mempunyai pendapatan, baik berupa usaha/kegiatan yang dikelola perempuan maupun laki-laki, tidak ada perbedaan. Program memfasilitasi usaha dan kegiatan warga yang sudah ada, termasuk dengan memperbaiki dan meningkatkan usaha.

B. Perempuan di Ranah Publik

Program JMK Oxfam adalah program untuk membangun ketangguhan bencana di Pasigala. Dan di antara membangun ketangguhan itu adalah membangun kesetaraan untuk keadilan gender. Program ini sangat menarik, karena membelajarkan kepada masyarakat bahwa, masyarakat yang setara adalah masyarakat yang tangguh bencana. Kesetaraan memungkinkan semua orang ikut berperan dalam mitigasi bencana dan sintas dari bencana.



Perempuan di ranah publik . (Foto: Degina Adenessa)

Perempuan adalah kelompok rentan bencana, namun perempuan juga paling cepat bangkit setelah bencana. Namun, potensi dan kekuatan perempuan diabaikan dalam mitigasi dan penanganan bencana. Sebagaimana perencanaan pembangunan yang mengabaikan kelompok-kelompok rentan, perempuan juga tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan dan pembuatan kebijakan. Karena itu, pembangunan dan kebijakan tidak mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan.

Ketika terjadi bencana, segala fasilitas yang disediakan dan kebutuhan sehari-hari tidak mengakomodasi kebutuhan perempuan. Pasca bencana, pembangunan hunian sementara atau hunian tetap juga tidak melibatkan partisipasi perempuan, atau tidak ada perencana dan ahli yang mempunyai perspektif perempuan dan gender.

Menurut Nining Rahayu, Direktur LBH APIK Sulawesi Tengah, pembangunan tempat pengungsian, hunian sementara, dan hunian tetap tidak memperhitungkan kebutuhan dan kenyamanan bagi perempuan, anak, disabilitas, dan lanjut usia. Karena orang-orang yang membangun atau

kontraktornya tidak mempunyai pengetahuan dan perspektif gender. Untuk Oxfam yang telah berpengalaman dalam penanganan dalam bencana, maka perspektif gender telah menjadi bagian dalam tanggap bencana hingga pemulihan.

Program JMK Oxfam di Pasigala sejak tahap pertama (tanggap darurat) hingga pemulihan tahap tiga, sepenuhnya melibatkan dan menjangkau seluruh komponen di dalam masyarakat. Perspektif gender dan inklusi adalah arus utama (*mainstreaming*) di dalam program, yang pada operasionalnya melibatkan seluruh komponen rentan, yaitu perempuan, anak, disabilitas, dan lanjut usia.

Untuk mendorong perempuan di ranah publik JMK Oxfam telah melakukan beberapa kegiatan, di antaranya sosialisasi pengarusutamaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial; pelatihan kepemimpinan perempuan pasca bencana; pelatihan kekerasan berbasis gender (gender based violence-GBV), pelatihan perlindungan dari eksploitasi dan penyalahgunaan seksual (*protection from sexual exploitation and abuse, PSEA*), pelatihan perempuan dan disabilitas untuk memengaruhi kebijakan dan anggaran. Pelatihan-pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemampuan perempuan dan kelompok rentan memiliki keberanian berbicara dan terlibat dalam pengambilan keputusan dan mendorong terbentuknya forum inklusi. Mereka juga terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran sehingga dapat memengaruhi kebijakan.

Setiap kegiatan selalu mendorong pelibatan perempuan dan alokasi khusus untuk perempuan dan kelompok rentan lainnya. Perempuan diberi kesempatan untuk menghadiri setiap kegiatan, baik untuk peningkatan kapasitas maupun dalam pengambilan keputusan. Pada kegiatan atau pengambilan keputusan yang berhubungan atau berdampak pada perempuan, maka pandangan dan suara perempuan harus menjadi utama.

Perempuan juga diberi akses yang sama dengan laki-laki untuk mengakses sumber daya. Pada sektor mata pencaharian atau *livelihood*, Program JMK Oxfam memfasilitasi sumber-sumber ekonomi yang digerakkan oleh perempuan dan laki-laki. Dana stimulan yang diberikan untuk petani laki-laki yang menanam sayur-sayuran, sama besarnya

dengan yang dialokasikan untuk perempuan yang berprofesi sebagai tukangjahit.

Perempuan didorong untuk terlibat dan dilibatkan di dalam kelompok-kelompok strategis di desa, seperti seperti Komite Air dan Pengurus Organisasi Penanggulangan Bencana. Dengan begitu, pandangan perempuan dapat memengaruhi pengambilan keputusan di kelompok-kelompok tersebut.

Pada tingkat perencanaan pembangunan dan pemerintahan, perempuan didorong untuk terlibat di dalam Musrenbang dari tingkat rendah (dusun, desa/kelurahan) hingga kabupaten/kota dan provinsi. Perempuan juga didorong untuk masuk di dalam lembaga-lembaga strategis di desa/kelurahan, seperti Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa, dan anggota dan Kepala BPD. Dengan masuk di dalam lembaga-lembaga tersebut, perempuan ikut berperan di dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan.

6

MELIBATKAN DISABILITAS DAN MELINDUNGI ANAK

Sebagaimana perempuan, dalam kondisi tanpa bencana, disabilitas atau penyandang disabilitas adalah kelompok berisiko atau rentan. Disabilitas menjadi kelompok rentan karena mengalami diskriminasi berlapis yang dialami oleh mereka. Disabilitas mengalami diskriminasi karena kondisi disabilitas (keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik) yang disandanginya, di samping atribut lainnya, seperti perempuan dan anak. Perempuan penyandang disabilitas mengalami diskriminasi berlapis sebagai perempuan dan sebagai disabilitas. Anak penyandang disabilitas mengalami diskriminasi sebagai anak dan sebagai disabilitas. Jika seorang anak perempuan yang menyandang disabilitas, maka dia akan mengalami diskriminasi sebagai anak, sebagai perempuan, dan sebagai disabilitas.



Orang selalu melihat disabilitas sebagai manusia yang menjadi beban, padahal disabilitas mempunyai potensi dan kemampuan sendiri yang tidak hanya berguna untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain dan masyarakat.

JUMAYA,
Pengurus HWDI Sulawesi Tengah

Tidak jarang, disabilitas bahkan mengalami diskriminasi dan kekerasan di dalam rumah atau oleh keluarganya sendiri. Ada disabilitas yang disembunyikan atau tidak dibiarkan berinteraksi dengan masyarakat. Di masyarakat, disabilitas dituding sebagai beban bagi masyarakat dan negara, yang kemudian menyebabkan perlakuan diskriminatif dan kekerasan terhadap disabilitas.

Anak juga merupakan kelompok yang berisiko atau rentan, karena anak belum dewasa (fisik, biologis, mental, sosial, spiritual), bergantung pada orang di dekatnya, dan belum mampu mengambil keputusan secara mandiri. Karenanya anak rentan menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Kekerasan dan eksploitasi terhadap anak terbanyak dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, yang menyebabkan anak mengalami gangguan dan hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

A. Melibatkan Disabilitas

Program JMK Oxfam di Pasigala adalah pembelajaran yang baik bagi membuka akses dan memberdayakan kelompok disabilitas. Gagasan program ini sangat inklusif, karena tanpa membeda-bedakan berbagai kelompok di dalam masyarakat. Disabilitas adalah kelompok sosial rentan yang di dalam program ini diberi ruang dan akses yang sama untuk mengembangkan diri dan berkontribusi di dalam masyarakat.

Jumaya (48 tahun) yang sering dipanggil Maya, salah satu pengurus HWDI Sulawesi Tengah, dan Ketua Forum Kelompok Rentan Kelurahan Talise, Palu berkomentar positif mengenai Program JMK Oxfam di Pasigala. "Program-program yang digagas untuk disabilitas, sebagian besar berupa bantuan yang berhubungan dengan kebutuhan fisik disabilitas, seperti kursi roda, tongkat dan lain-lain. Bantuan itu penting dan dibutuhkan. Namun, disabilitas juga membutuhkan ruang untuk ekspresi dan berkontribusi. Sebagai kelompok berisiko, disabilitas juga mempunyai potensi dan kemampuan yang mesti difasilitasi. Program JMK Oxfam memfasilitasi ruang tersebut, berupa pelatihan, sosialisasi hak-hak asasi manusia dan hak disabilitas, pertemuan/diskusi, dan pembentukan kelompok yang akan meningkatkan kepercayaan diri disabilitas untuk berinteraksi dengan sesama disabilitas dan pihak lain, maupun untuk menghubungkan disabilitas dengan pihak-pihak lain."



Pembentukan Forum Inklusi. (Foto: Degina Adenessa)

Sebagaimana dikemukakan oleh Jumaya, sebagian disabilitas tidak percaya diri, bahkan tidak berinteraksi dengan sesama disabilitas. Hal itu terjadi karena sejak kecil, mereka tidak diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain, bahkan sebagian orang tua/keluarga terkesan menyembunyikan anak-anak atau anggota keluarganya yang menyandang disabilitas. Padahal disabilitas mempunyai kemampuan dan potensi yang harus diberi ruang dan difasilitasi. Disabilitas tidak dipandang dan tidak dituding sebagai beban, tetapi merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan dan potensi.

Karena itu, disabilitas harus diberi ruang dan akses untuk menyalurkan kemampuan dan potensinya. Program JMK Oxfam telah memfasilitasi disabilitas untuk peningkatan kapasitas dan pertemuan-pertemuan untuk membicarakan kebutuhan dan kepentingan mereka. Ada disabilitas yang baru pertama kali mengikuti pertemuan dan tahu bahwa terdapat banyak disabilitas dengan kondisi yang berbeda-beda.

Hadida (51 tahun) yang akrab dipanggil Mama Reza adalah disabilitas yang baru pertama kali mengikuti pertemuan disabilitas. Perempuan disabilitas

netra ini juga baru tahu bahwa dirinya yang buta atau tidak melihat itu disebut sebagai disabilitas netra atau tuna netra. Dalam tiga tahun ini, Mama Reza tidak melihat sama sekali karena penyakit, tapi dia tidak merasa malu dengan kondisinya. Dia menjadi semakin percaya diri setelah mengikuti pertemuan yang dihadiri oleh disabilitas dan bertemu dengan disabilitas yang percaya diri dengan kondisinya.

Pengembangan Kampung Siaga Bencana juga bersifat inklusif, termasuk melibatkan disabilitas sebagai pengurus. Sebagai kelompok rentan, disabilitas membutuhkan sarana dan kondisi khusus untuk mobilitas, termasuk jika terjadi bencana. Keterlibatan disabilitas di dalam organisasi atau lembaga yang berhubungan dengan mitigasi dan tanggap bencana, akan sangat bermanfaat bagi disabilitas, karena memberi masukan untuk penyediaan kebutuhan disabilitas jika terjadi bencana.

Program ini juga memfasilitasi Musrenbang khusus untuk kelompok rentan atau disebut pra Musrenbang, yang kemudian melahirkan Forum Inklusi atau Forum Kelompok Rentan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Forum ini telah melakukan pertemuan dan dialog dengan pemerintah untuk menyampaikan permasalahan yang dialami oleh kelompok rentan.

Forum Inklusi atau Forum Kelompok Rentan juga dibentuk di tingkat desa/kelurahan pada 33 desa/kelurahan. Forum tersebut mendapat pengakuan dan pengesahan melalui Surat Keputusan dari pemerintah desa/kelurahan. Pembentukan Forum Inklusi juga dilakukan pada tingkat kecamatan dan kabupaten/kota. Forum tersebut menjadi wadah bagi kelompok rentan untuk menyampaikan kebutuhan dan kepentingan mereka, serta memengaruhi pembentukan kebijakan.

Diskriminasi menyebabkan pembangunan tidak ramah terhadap disabilitas dan tidak inklusif, termasuk di dalamnya menghambat disabilitas mengakses layanan publik, seperti bantuan sosial, administrasi, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Pemberian akses yang sama kepada disabilitas pada layanan publik, dan pelibatan disabilitas dalam tahap-tahap pembangunan akan menjadikan pembangunan lebih inklusif untuk semua orang. Sebagaimana diserukan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Tidak ada Satupun yang Ditinggalkan (*No One Left Behind*).

B. Melindungi Anak

Sebagai kelompok berisiko/rentan, pemenuhan hak dan perlindungan anak juga menjadi perhatian Program JMK Oxfam. Hak dan perlindungan anak menjadi bagian yang terintegrasi di dalam program. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan harus memastikan ramah terhadap anak. Penerima manfaat harus mendapatkan pengetahuan mengenai hak dan perlindungan anak untuk mencegah dan mengurangi kekerasan dan eksploitasi anak.

Beberapa permasalahan serius yang mendapat perhatian dari program, seperti perkawinan anak, banyaknya anak-anak yang merokok, anak tengkes (stunting), putus sekolah, dan kekerasan seksual. Permasalahan anak tersebut dijadikan arus utama (*mainstreaming*) sehingga menjadi perhatian semua pihak. Isu-isu anak selalu menjadi bahan pembicaraan di kelompok, organisasi/lembaga, dan pemerintah.

Program JMK Oxfam memfasilitasi pengadaan buku untuk rumah baca atau taman bacaan, pentas anak, dan diskusi/dialog berbagai pihak mengenai hak dan perlindungan anak. Adam (14 tahun) yang aktif di Sanggar Lauro malanda, Langaleso, Dolo, Kabupaten Sigi, menuturkan,



Ruang ramah anak untuk perlindungan anak. (Foto: Degina Adenesa)



Salah satu kegiatan melatih anak-anak untuk mengekspresikan diri dan mengasah bakatnya. (Foto: Degin Adenessa)

dia dan teman-teman aktif di sanggar dengan kegiatan bermusik tradisional, kemudian Sanggar mendapat bantuan buku dari Oxfam, sehingga mereka juga berkumpul untuk membaca. Menurutnya, para orang tua juga senang karena anak-anak mereka suka berkumpul di Sanggar dan tidak keluyuran.

Sofan (28 tahun) yang merupakan pembina anak-anak di Sanggar Lauro malanda menuturkan, kegiatan-kegiatan di Sanggar dikelola sebagai "Taman Baca Masyarakat dan Lingkungan Ramah Anak". Konsep Lingkungan Ramah Anak atau Ruang Ramah Anak mulai dikenalkan untuk perlindungan anak.

Sebelumnya LBH APIK Sulawesi Tengah telah melakukan sosialisasi mengenai kekerasan perempuan dan anak, kemudian diperkuat oleh program JMK Oxfam yang mengenalkan hak-hak dan perlindungan anak. Konsep Lingkungan Ramah Anak adalah, semua anak, baik yang masih sekolah maupun yang telah putus sekolah, difasilitasi melakukan kegiatan-kegiatan positif di Sanggar Lauro malanda, seperti berlatih menyanyi, menari, dan baca buku. Anak-anak dapat mengekspresikan diri

dan mengasah bakatnya melalui musik dan tari. Anak-anak yang belajar di Sanggar Lauro malanda telah tampil di berbagai acara hingga tingkat nasional.

Sanggar Lauro malanda adalah Lingkungan Ramah Anak sekaligus tempat untuk “menahan” anak-anak. Dengan begitu anak-anak tidak ke mana-mana yang bisa saja melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan dirinya dan masyarakat. Anak-anak juga mulai dikenalkan hak-hak dan perlindungan anak, sehingga dapat menginformasikan kepada teman sebayanya. Sementara untuk orang-orang dewasa dikenalkan hak-hak dan perlindungan anak untuk mencegah dan mengurangi kekerasan terhadap anak.

Sementara Nurlian (45 tahun), warga Langaleso mengatakan bahwa, dulu orang tua, terutama ibu-ibu sering memukul anaknya, tetapi sejak ada Posko Paralegal LBH APIK dibentuk di Langaleso, ibu-ibu sudah tahu bahwa memukul anak itu dilarang dan melanggar hukum. Kemudian JMK Oxfam juga mengenalkan hak-hak anak dalam kegiatannya, jadi kekerasan terhadap anak, khususnya anak-anak yang dipukul itu mulai menurun.

Program JMK Oxfam juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak dan perlindungan anak pada momen tertentu, misalnya Peringatan Hari Anak Nasional. Sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak dilakukan kepada masyarakat dan pemerintah melalui berbagai bentuk kegiatan untuk mengubah persepsi dan pendekatan masyarakat dan pemerintah dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

7

KAMPUNG SIAGA BENCANA INKLUSI



Bencana itu selalu ada, makanya penduduk harus siap, jadi kalau ada bencana semua orang dapat berusaha untuk menyelamatkan diri dan menuju tempat-tempat yang sudah ditentukan, tapi itu harus terus-menerus diingatkan, kalau tidak orang akan lupa.

PURBADIANSYAH
Pengurus Siaga Bencana Desa Toaya

Kampung Siaga Bencana disingkat KSB adalah suatu daerah/kawasan (kampung, desa, kelurahan, dusun) penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang disiapkan dan dikembangkan, baik melalui pembangunan fisik, pengadaan sarana, dan penyadaran serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Dengan demikian, KSB adalah daerah/kawasan yang memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi terjadinya bencana.

KSB adalah salah satu model daerah/kawasan yang siap siaga menghadapi bencana, yang dikembangkan oleh Program JMK Oxfam. Pengembangan daerah/kawasan model mulai dicanangkan bertepatan dengan Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana, 26 April 2019. Desa Lende Ntovea, Kecamatan Sirenja, Donggala ditetapkan sebagai desa model atau desa percontohan KSB.



Perempuan melakukan pemetaan jalur evakuasi. (Foto: Deginia Adenessa)

Pengembangan KSB berangkat dari minimnya upaya yang dilakukan pemerintah desa dan masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana. KSB bertujuan meningkatkan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, melalui pembangunan fisik, penyadaran masyarakat, dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Dalam proses tersebut, semua komponen di dalam daerah/wilayah dilibatkan, termasuk kelompok-kelompok berisiko atau rentan.

Pada saat pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi di Desa Lende Ntovea, kelompok ibu-ibu desa tak luput dalam memberikan pendapat dan saran sampai ke persoalan teknis berupa pemetaan lokasi jalur-jalur evakuasi yang berada di wilayah perbukitan desa. Sebanyak 9 ibu-ibu menyusuri perbukitan dari 3 dusun bersama tim JMK Oxfam. Hasilnya, titik penting pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi diselesaikan. Penyusuran bukit, pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi, dan pemetaan lokasi jalur evakuasi adalah pembelajaran langsung mengenai kesiapsiagaan bencana bagi perempuan Desa Lende Ntovea.

A. Siap Siaga Menghadapi Bencana

Undang-Undang Penanggulangan Bencana (UU No. 24 Tahun 2007) menyebutkan, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (Pasal 1 angka 7). Sementara Diposaptono & Budiman (2007) menyebut kesiapsiagaan merupakan kegiatan dari upaya yang diambil dalam mengantisipasi bencana untuk memastikan tanggapan yang efektif terhadap dampak bencana. Tujuannya untuk mencegah korban (kematian, hilang, luka) sejauh yang dapat dihindarkan, kerusakan harta benda, mengurangi penderitaan, serta memudahkan tanggapan dan pemulihan secara cepat.

Menurut Purbadiansyah, Pengurus Siaga Bencana Desa Toaya, bahwa KSB adalah daerah atau wilayah (desa, dusun) yang siap menghadapi bencana, bencana apapun itu, yang sudah pasti selalu terjadi, misalnya di Desa Toaya, seperti gempa, tsunami, angin puting beliung, dan banjir. Bencana itu pasti ada dan datangnya kita tahu maupun tidak tahu. Misalnya, bajir kita bisa tahu karena terjadi di musim hujan, begitu juga angin puting beliung selalu terjadi di musim barat atau pada bulan Desember-Januari, sedangkan gempa dan tsunami kita tidak tahu, makanya kita harus menyiapkan semua masyarakat untuk selalu siap ketika terjadi bencana sehingga mengurangi resiko. Penduduk di semua umur harus mengetahui tanda-tanda terjadinya bencana dan tahu jalur-jalur untuk penyelamatan.

Perlu digarisbawahi bahwa tidak semua upaya kesiapsiagaan ini harus memerlukan biaya atau memerlukan ketrampilan teknis yang tinggi, melainkan upaya-upaya kesiapsiagaan ini sebenarnya biasa-biasa saja dan seharusnya dapat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penanganan bencana, baik pemerintah maupun nonpemerintah, dengan melibatkan semua potensi yang tersedia.

Pada tahap awal, KSB didukung oleh JMK Oxfam dengan melakukan pelatihan, pemetaan dan pemasangan jalur-jalur evakuasi. Tahap selanjutnya, KSB menjadi bagian dari pembangunan desa, sehingga tidak menjadi kegiatan insidental, melainkan menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat. KSB adalah daerah yang dibangun dengan perspektif bencana.



Pelatihan Destana Inklusi. (Foto: Degina Adenessa)

KSB diadopsi ke dalam perencanaan pembangunan, misalnya pada pembangunan desa, yakni di dalam RPJM Desa dan RKP Desa, sehingga program/kegiatan kesiapsiagaan bencana dibiayai oleh anggaran desa. Untuk menjadikan KSB sebagai program pemerintah dan masyarakat desa sepanjang masa, maka perlu diatur di dalam Peraturan Desa (Perdes).

B. KSB Inklusi

Ketangguhan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana adalah menyiapkan semua kelompok masyarakat di dalam daerah/wilayah untuk selalu siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Karenanya semua kelompok masyarakat, terutama kelompok berisiko atau rentan, harus menjadi bagian dari pengembangan dan penguatan KSB, sehingga menjadi Kampung Siaga Bencana Inklusi (KSBI).

Kelompok berisiko, yakni perempuan, perempuan kepala rumah tangga, ibu hamil, ibu menyusui, anak, lanjut usia, dan disabilitas harus mendapat perhatian khusus dalam pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi. Jalur evakuasi harus memungkinkan dapat digunakan oleh penduduk dalam kondisi khusus, utamanya ibu hamil, ibu menyusui, anak, lanjut usia, dan disabilitas.

Tentu, lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab untuk penanggulangan bencana harus mempunyai data yang valid mengenai kelompok rentan dan selalu divalidasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Purbadiansyah, di desa pasti ada orang-orang yang membutuhkan bantuan jika terjadi bencana karena mereka kesulitan menyelamatkan diri, seperti disabilitas, orang-orang tua, ibu hamil, dan anak-anak kecil. Karena itu, jalur-jalur evakuasi harus dibangun disesuaikan untuk bisa dilalui oleh semua orang. Jika perlu kelompok-kelompok tersebut harus didahulukan diselamatkan oleh lembaga penanggulangan bencana. Namun, itu harus disosialisasikan sehingga semua orang tahu, termasuk dilakukan pelatihan atau simulasi jadi semua orang terbiasa.

KSB menjadikan bencana sebagai bagian dari pembangunan dan kehidupan bermasyarakat. Semua lembaga, organisasi, perkumpulan, atau kelompok di suatu daerah/wilayah dilibatkan dalam membangun ketangguhan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Organisasi atau kelompok perempuan, disabilitas, dan anak dilibatkan dalam upaya-upaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kewaspadaan, dan simulasi mengenai penyelamatan jika terjadi bencana.

Pengembangan KSB harus rasional berbasis kearifan lokal, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Rencana penanggulangan bencana disusun bersama oleh semua unsur di dalam daerah/wilayah berdasarkan data-data ilmiah dan valid yang dapat dipertanggung jawabkan. Rencana-rencana tersebut disosialisasikan sehingga menjadi pengetahuan bersama masyarakat. Termasuk pembuatan bangunan, pemasangan peralatan, papan pengumuman, dan sebagainya menjadi milik pemerintah dan masyarakat desa yang harus dijaga.

8

KESETARAAN GENDER DAN INKLUSI

Program Membangun Ketangguhan Bencana Pasigala memberi pembelajaran yang baik dalam pendekatan kesetaraan gender dan inklusi sosial (*gender equality and social inclusion-GESI*). Perspektif gender dan inklusi sosial tidak hanya menjadi syarat bagi program, pelaksana program, dan semua mitra JMK Oxfam, tetapi juga implementasi program dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di lapangan. Gender dan inklusi terintegrasi di dalam program, pendekatan program, dan dipastikan terimplementasi di dalam kegiatan.

Memang tidak mudah bagi setiap lembaga dan individu memasukkan gender dan inklusi dalam setiap program atau kebijakan. Karena gender sering disalahartikan sebagai perempuan, sehingga ketika orang berbicara gender dianggap sebagai berbicara tentang jenis

“

Perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan, sangat rentan kalau terjadi bencana, tetapi program pemulihan bencana sedikit sekali diperuntukkan untuk kelompok- kelompok rentan, itu terkait dengan pengetahuan, kepedulian dan perspektif orang-orang yang melaksanakan program."

YOSPINA LIKU LA'BI
JMK-PKBI Sulteng



Setara itu nyata. (Foto: Deginia Adenessa)

kelamin perempuan. Namun, perspektif gender dalam pembangunan dan kebijakan masih lebih baik dari inklusi sosial. Inklusi sendiri merupakan perspektif dan pendekatan yang dipopulerkan oleh lembaga-lembaga kemanusiaan internasional dan organisasi non pemerintah atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang fokus pada disabilitas dan HAM (Hak Asasi Manusia).

Di pemerintahan, gender dan inklusi adalah perspektif dan pendekatan baru dalam pembangunan. Karena itu, pada pertemuan-pertemuan resmi di pemerintahan, gender dan inklusi sering menjadi bahan lelucon yang tidak pantas, sebagian menjerus pada penghinaan terhadap perempuan dan disabilitas. Istilah disabilitas pun merupakan istilah yang masih asing bagi sebagian besar pegawai di pemerintahan. Mereka masih menggunakan istilah cacat, penyandang cacat, tuna netra, tuna daksa, dan sebagainya. Instrumen nasional yang menggunakan istilah disabilitas baru disahkan pada tahun 2016, yakni Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UU No.8/2016) untuk menggantikan Undang-Undang Penyandang Cacat (UU No. 4/1997).

A. Kesetaraan Gender

Program Membangun Ketangguhan Bencana Pasigala JMK Oxfam mendorong implementasi kesetaraan gender melalui berbagai kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung. Kegiatan langsung berupa kegiatan yang ditujukan untuk perempuan, disabilitas, dan anak. Sedangkan kegiatan tidak langsung berupa kegiatan-kegiatan umum, namun perspektif gender menjadi arus utama dalam kegiatan tersebut.

Pertama, pada sektor mata pencaharian (livelihood). Kegiatan-kegiatan di dalamnya melibatkan perempuan dan laki-laki sesuai dengan kebutuhan dan usulan masing-masing. Tidak ada perbedaan bagi penyintas untuk mengakses dana stimulan dari program. Perbedaan hanya terjadi pada hal-hal teknis sesuai dengan kebutuhan.

Kedua, pelatihan dan pertemuan. Pada pelatihan atau pertemuan yang khusus, pesertanya juga khusus dan terbatas, misalnya pertemuan forum inklusi dan forum anak. Namun, pertemuan-pertemuan umum, maka peserta selalu memperhatikan keseimbangan gender dan inklusi. Kelompok perempuan, anak, dan disabilitas diberi akses untuk menjadi pelaksana atau menjadi peserta.

Ketiga, penguatan perempuan dan kelompok berisiko atau rentan. Perempuan dan kelompok rentan (disabilitas, anak, lanjut usia) adalah kelompok yang mempunyai akses yang lemah terhadap sumber daya dan berbagai sektor pembangunan pemerintah maupun non pemerintah. Karena itu, penguatan perempuan dan kelompok rentan menjadi perhatian dalam program ini melalui pertemuan, pelatihan, pembentukan dan penguatan organisasi.

Keempat, advokasi untuk mendorong perempuan terlibat di dalam organisasi atau lembaga yang membuat keputusan dan kebijakan. Perempuan perlu didorong untuk duduk di posisi strategis pada organisasi atau lembaga masyarakat maupun lembaga pemerintah, sehingga mereka dapat berpartisipasi dan memengaruhi pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan.

Kelima, penguatan media. Program ini tidak hanya melibatkan media untuk pemberitaan program/kegiatan, tetapi juga ikut memperkuat kapasitas jurnalis mengenai perspektif perempuan dan gender. Sebagian

besar berita mengenai perempuan menggunakan bahasa-bahasa yang menghukum perempuan. Berita mengenai perempuan korban kekerasan seksual sering kali menempatkan korban sebagai terhukum, tidak ada unsur edukasi bagi pembaca untuk menentang kekerasan seksual, atau tidak ada unsur advokasi kepada pihak terkait untuk mengatasi permasalahan perempuan. Sebagian berita di media cetak dan online masih bias gender dan mengeksploitasi perempuan. Karena itu, peningkatan kapasitas jurnalis mengenai perempuan, gender, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sangat penting.

B. Inklusi

Pendekatan inklusi dalam program pemulihan bencana tergolong baru di Indonesia. Program JMK Oxfam di Pasigala merupakan pionir dalam mengenalkan program pemulihan bencana dengan pendekatan inklusi untuk memastikan semua orang dan kelompok sosial mengakses sumber daya dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Sebelumnya, perspektif dan pendekatan inklusi digunakan oleh lembaga-lembaga kemanusiaan internasional dan LSM untuk advokasi hak-hak dan pemberdayaan kelompok disabilitas.

Kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya masih sangat sulit dalam mengakses sumber daya dan terlibat dalam pembangunan. Pendekatan inklusi penting untuk memastikan semua orang dan kelompok sosial, terutama disabilitas dan kelompok rentan mendapatkan akses untuk layanan publik dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan.

Sebagai program pemulihan bencana, Program JMK Oxfam di Pasigala memberi beberapa pembelajaran mengenai pendekatan inklusi. **Pertama**, mempromosikan pendekatan inklusi. Perspektif inklusi tergolong baru dalam pendekatan pembangunan di Indonesia. Dibanding perspektif dan pendekatan gender yang sudah cukup dikenal dan masyarakat, inklusi baru populer di kalangan terbatas. Program JMK Oxfam mempromosikan inklusi kepada pemerintah, media, dan masyarakat umum.

Kedua, memberi ruang dan kesempatan kepada disabilitas, baik untuk mengekspresikan diri maupun untuk berinteraksi dengan kelompok lain di masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Jumaya, pengurus HWDI Sulawesi Tengah, dan Ketua Forum Kelompok Rentan Kelurahan Talise



Jumaya Ketua Forum Kelompok Rentan Kelurahan Talise. (Foto: M. Ghufan H. Kordi K.)

bahwa, sebagian disabilitas tidak percaya diri dalam berinteraksi dengan disabilitas yang lain, apalagi dengan non disabilitas. Ini bisa terjadi karena selama ini disabilitas tidak diberi ruang dan kesempatan untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat.

Ketiga, meningkatkan sumber daya penyandang disabilitas. Program ini secara langsung meningkatkan sumber daya disabilitas melalui pertemuan, pelatihan, pelibatan mereka dalam diskusi-diskusi dengan berbagai pihak. Keterlibatan disabilitas di dalam proses-proses pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan akan menjadikan kebijakan yang dibentuk dan keputusan yang dibuat lebih inklusif.

Keempat, membentuk dan memperkuat organisasi disabilitas dan kelompok rentan. Pembentukan dan penguatan organisasi disabilitas dan kelompok inklusi (seperti forum inklusi) diharapkan meningkatkan peran

organisasi disabilitas dan kelompok rentan dalam pembangunan. Organisasi-organisasi tersebut menjadi ujung tombak dalam upaya mengadvokasi kebutuhan dan kepentingan disabilitas dan kelompok rentan.

Kelima, advokasi kepada lembaga dan pihak-pihak terkait untuk menggunakan pendekatan inklusi dalam pembentukan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan. Staf program JMK Oxfam selalu menyampaikan dan menggunakan perspektif gender dan inklusi kepada pemerintah, termasuk mengadvokasi pemerintah untuk untuk mengadopsi pendekatan tersebut.

Keenam, penguatan media mengenai inklusi. Inklusi adalah pendekatan yang baru, karena itu diperlukan pemberitaan yang tepat untuk mendukung promosi inklusi. Sementara itu, di berbagai media masih ditemukan istilah cacat dan penyandang cacat, termasuk berita-berita yang menempatkan disabilitas sebagai beban. Penguatan jurnalis mengenai gender dan inklusi diharapkan mengubah perspektif jurnalis untuk membuat peliputan dan pemberitaan yang tidak bias.

9

BERADAPTASI DI MASA PANDEMI

Ketika penyintas bencana Pasigala mulai bangkit dan menata kehidupan yang porak-poranda. Aktivitas ekonomi dan sosial perlahan mulai pulih, bencana yang baru muncul. Pandemi Covid (*Coronavirus disease*)-19, penyakit yang disebabkan oleh virus SARS CoV-2, mengubah kehidupan sosial masyarakat di seluruh dunia, termasuk masyarakat Pasigala. Masyarakat diminta untuk menjaga jarak (*physical distancing*), melakukan pembatasan sosial (*social distancing*), bekerja di rumah (*work from home*), hingga rumah-rumah ibadah pun harus ditutup sementara untuk memutus rantai penyebaran virus.

Pandemi Covid-19 ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional dan dalam masa tanggap darurat dilakukan pembatasan-pembatasan ketat. Selama akhir Maret sampai akhir Mei 2020 pembatasan ketat dilakukan di Indonesia, yang berpengaruh langsung pada ekonomi nasional. Penyintas bencana yang baru mulai bangkit dari bencana di Pasigala menghadapi ancaman baru, karena aktivitas ekonomi yang baru mulai bangkit dan perlahan berkembang,



Di awal pandemi yang justru semua petani sayur takutkan adalah hasil panen yang tidak laku atau laku dengan harga murah sehingga petani tidak mendapat keuntungan.

BURHANUDDIN, petani



Petani sayur, tetap berproduksi di masa pandemi. (Foto: Degina Adenessa)

kembali menghadapi tantangan berat, sebagian di antaranya berhenti total.

Petani, nelayan, peternak, dan petambak garam umumnya masih tetap menjalankan kegiatan dan berproduksi, tetapi sebagian usaha kecil seperti warung/rumah makan, kafe, pembuat kue dan penganan lainnya yang disuplai ke rumah makan dan kafe berhenti total. Pengolah hasil perikanan, seperti pembuatan abon masih tetap menjalankan aktivitasnya. Sementara penjahit juga berhenti untuk sementara karena tidak ada pesanan.

Petani sayur di pinggiran Kota Palu tetap bisa menanam sayur, namun permintaan menurun sehingga pendapatan petani juga mengalami penurunan. Burhanuddin, petani yang menanam bayam merah dan bayam putih menuturkan, pada awal pandemi pendapatan petani sayur mengalami penurunan antara 30-60 persen. Penurunan terjadi karena menurunnya permintaan dari hotel, restoran, dan rumah makan. Karena itu, sebagian petani sayur mengurangi luas penanaman untuk menghindari kerugian. Pada pertengahan Juli 2020 permintaan sayur sudah mulai naik sehingga petani kembali memperluas penanaman.



Tetap menggunakan masker. (Foto: Degina Adenessa)

Di awal pandemi, menurut Pak Bur—nama akrab Burhanuddin—ada petani yang ketakutan, tetapi ada yang tidak takut sama sekali. Yang justru semua petani sayur takutkan adalah hasil panen yang tidak laku atau laku dengan harga murah sehingga petani tidak mendapat keuntungan. Namun, petani dihimbau pemerintah untuk tetap menggarap lahannya, ini menggembirakan juga karena kami mendapat keleluasaan untuk mengolah lahan. Setelah Juli 2020 semua orang diminta selalu menggunakan masker dan menjaga jarak. Kalau menjaga jarak, petani tidak sulit karena memang bekerja saja sudah berjarak dan tidak ada kerumunan di lahan. Yang sulit itu menggunakan masker, kadang-kadang sulit juga bernapas kalau memakai masker dalam waktu lama. Tapi kalau ke pasar atau ke toko harus pakai masker karena banyak orang.

Sementara menurut Untung, nelayan di Desa Toaya Vunta bahwa, pandemi tidak memengaruhi aktivitas penangkapan ikan, namun pandemi menyebabkan harga ikan jatuh, walaupun tidak besar, terutama untuk pasar lokal sekitar 20-30 persen. Tapi itu dirasakan nelayan, karena biasanya harga ikan rendah kalau pasokan berlimpah, sedangkan pada masa pandemi harga ikan jatuh walaupun pasokan ikan terbatas. Berbeda

dengan nelayan yang menangkap ikan-ikan tertentu untuk kebutuhan ekspor yang tidak terpengaruh dengan pandemi.

Untung menjelaskan, hasil tangkapan nelayan yang tidak terjual masih bisa diolah oleh istri-istri nelayan untuk memproduksi olahan hasil perikanan yang harga jualnya lebih tinggi, seperti ikan kering/asin, abon, dan bakso ikan. Pengolahan hasil-hasil perikanan juga sudah biasa dilakukan oleh kelompok-kelompok perempuan di Desa Toaya Vunta. Namun, di masa pandemi, olahan hasil perikanan juga kurang terserap karena sebagian besar rumah makan ditutup dan permintaan dari pedagang juga berkurang. Namun pengolahan hasil perikanan tetap dilakukan untuk mengawetkan hasil tangkapan yang tidak terjual. "Bulan Agustus 2020 harga ikan sudah mulai stabil karena masyarakat juga banyak yang kembali bekerja di luar, namun kami selalu diminta oleh teman-teman JMK Oxfam untuk selalu menjaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak," tambah Untung.

Beberapa usaha menjahit di Desa Langaleso yang baru dirintis kembali dan mulai berjalan pada Agustus 2019, harus jeda di awal pandemi. Winartini bersama kelompoknya mulai menjahit kembali setelah mendapat dukungan JMK Oxfam, namun pandemi menghentikan lagi usaha tersebut. Staf Program JMK Oxfam mendorong kelompok penjahit untuk memproduksi masker. Program JMK Oxfam sendiri memesan 1.000 masker yang penjahitannya dibagi kepada beberapa kelompok penjahit. Sementara penjahit yang lain, Mega mendapat pesanan masker dari beberapa pemerintah desa di Kecamatan Dolo yang penjahitannya juga dibagikan kepada kelompok-kelompok penjahit di Desa Langaleso.

Ketika pemerintah menerapkan tahap kenormalan baru pada 1 Juni 2020, kegiatan perekonomian warga penyintas bencana juga bersiap untuk bangkit dan beradaptasi dengan kondisi tersebut. Kehidupan normal baru ditempuh dengan pembatasan-pembatasan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Untuk mendukung penyintas bangkit dari bencana pandemi, JMK Oxfam menyediakan kebutuhan bagi penyintas yang beraktivitas di luar rumah atau berinteraksi dengan orang, di antaranya pembagian masker dan penyediaan tempat mencuci tangan di tempat-tempat umum, seperti pasar, puskesmas, masjid, dan gereja.



Program JMK Oxfam mendorong kelompok penjahit untuk memproduksi masker.
(Foto: Degina Adenessa)

Namun beradaptasi dengan kenormalan baru tidak mudah. Tim JMK Oxfam di lapangan juga bekerja keras mengingatkan warga agar mematuhi protokol kesehatan. Kerja keras JMK Oxfam menuai hasil, karena penyintas bencana yang merupakan penerima manfaat Program JMK Oxfam cukup mematuhi protokol kesehatan. Dan di antara penerima manfaat yang paling mematuhi protokol kesehatan adalah perempuan. Penulis melakukan pengamatan terhadap perempuan-perempuan yang berada di tempat umum dan berinteraksi dengan orang lain selalu menggunakan masker. Narasumber perempuan yang penulis wawancarai, hanya satu yang tidak menggunakan masker, sedangkan narasumber laki-laki tidak ada satu pun yang menggunakan masker saat diwawancarai.

Jumaya atau Maya, disabilitas yang juga Ketua Forum Kelompok Rentan Kelurahan Talise, Palu menyatakan perempuan dan kelompok-kelompok berisiko atau rentan biasanya lebih patuh pada aturan. Ketika masyarakat diminta menggunakan masker di tempat umum, itu terlihat perempuan lebih banyak yang menggunakan masker dibanding laki-laki. Itu karena

perempuan, terutama yang mempunyai aktivitas di luar rumah dan berinteraksi dengan orang lain, tidak menginginkan ada gangguan dan hambatan. Perempuan juga selalu memikirkan anak dan keluarganya, sehingga menjadi lebih patuh, termasuk pada himbauan atau aturan baru.

Di masa pandemi, sektor mata pencaharian penyintas bencana di Pasigala menghadapi tantangan yang sangat berat. Upaya untuk membangun kembali sektor mata pencaharian yang didukung oleh JMK Oxfam mulai menunjukkan kemajuan. Namun pemulihannya belum mencapai 100 persen, sudah mendapat bencana baru. Samini (50 tahun), warga Desa Toaya Vunta bersama kelompoknya memproduksi kue, makanan, dan olahan ikan sesuai pesanan. Usaha mereka sudah mulai berjalan, namun pandemi Covid-19 menghentikan usaha mereka, karena semua acara yang membutuhkan kue dan makanan dalam jumlah banyak, seperti perkawinan, khitanan, acara pelepasan siswa, dan lain-lain tidak diizinkan dilaksanakan secara tatap muka. Di sisi lain, suami-suami mereka yang bekerja sebagai nelayan, petani, buruh, dan lain-lain juga pendapatannya menurun. Sebagian di antaranya tidak mempunyai pendapatan sama sekali pada awal-awal pandemi. Menurut Samini, waktu itu sangat berat walaupun ada bantuan pemerintah.

Karena itu, ketika pemerintah mengumumkan kenormalan baru, penyintas bencana Pasigala menyambut gembira. Aktivitas mata pencaharian mulai bangkit kembali, sebagian di antaranya sudah normal, seperti petani, nelayan, dan petambak garam. Beberapa sektor usaha lainnya, seperti usaha menjahit, pembuat kue, olahan hasil perikanan, juga mulai bangkit dari bencana yang kedua. Mereka bangkit dengan protokol kesehatan.

10

PELIBATAN JURNALIS

Program JMK Oxfam di Pasigala mendapat liputan yang cukup luas di media massa cetak, elektronik, dan dalam jaringan (daring) atau *online*. Liputan dan pemberitaan media yang luas menguntungkan dari dua sisi. Pertama, pemberitaan yang dilakukan oleh media umum dan independen adalah salah bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik, dan kedua, pembelajaran program dan kegiatan yang baik dapat diketahui secara luas oleh publik.

Perkembangan program dan berbagai pembelajaran penting juga dapat diakses di website JMK, jmk.or.id, yang ditulis oleh Deginia Adenessa dan Nurwahida. Publikasi yang dilakukan secara mandiri mempunyai keunggulan karena dikelola oleh staf di dalam program. Tujuan dan perspektif program dapat disampaikan secara tepat, potret program dan kegiatan lebih mendalam, dan kekeliruan dapat dikurangi.

Publikasi merupakan faktor penting dalam setiap program/proyek dan kegiatan. Program atau kegiatan akan menghasilkan pembelajaran, pengalaman, dan memproduksi



Media dapat membunuh orang-orang yang masih hidup.

ZULKARNAIN HAMSON
Jurnalis & Akademisi

pengetahuan, yang akan berguna bagi perbaikan pendekatan dan metode, yang selanjutnya berkontribusi pada berbagai aspek pembangunan, ilmu dan teknologi, serta kemanusiaan.

A. JURNALIS DAN BENCANA

Jurnalis, wartawan, atau pewarta dan media mempunyai posisi penting di dalam kehidupan di negara demokrasi. Media mempunyai posisi yang sangat kuat dalam memengaruhi perspesi publik, karenanya juga dapat memengaruhi perubahan kebijakan di berbagai tingkat pemerintahan. Demikian pula, pengambil kebijakan, tentu mempunyai kepentingan terhadap jurnalis dan media, baik untuk menjelaskan kebijakan yang dibuat, maupun untuk mengukur sikap publik terhadap kebijakan tersebut.

Posisi media yang sangat urgen oleh beberapa pemikir pembangunan menempatkan media sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan. Pembangunan tidak hanya soal meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, tetapi juga soal kebebasan pers (media massa), dan kesetaraan perempuan dan laki-laki, atau kesetaraan gender (Sen, 1999; Nugroho, 2008).

Sejarah mencatat banyak sekali peristiwa di mana media mampu “menyelamatkan” nyawa manusia melalui pemberitataan. Amartya Sen—peraih



Kekuatan media adalah memelihara ingatan. (Foto: Deginia Adenessa)

Nobel Ekonomi 1998—mencatat, Tiongkok (RRC) pernah mengalami bencana kelaparan yang mungkin terbesar sepanjang sejarah. Sekitar 30 juta penduduk Tiongkok meninggal akibat kegagalan program Lompatan Jauh ke Depan (*Great Leap Forward*) selama 1958-1961. Sebaliknya, India tidak pernah mengalami bencana kelaparan sedahsyat itu sejak kemerdekaannya tahun 1947. Ini terjadi karena keterbukaan sistem politik India memberikan potensi *early warning* dari pemberitaan pers. Oleh karena itu, demokrasi dan kebebasan—termasuk kebebasan pers—menjadi satu dimensi penting dalam rumusan pembangunan Amartya Sen.

Karenanya, salah satu ukuran kualitas demokrasi adalah kebebasan pers. Pers yang bebas dan berkualitas tidak sekadar memberitakan apa saja yang terjadi di masyarakat, tetapi juga ikut memberikan dan menjaga kualitas pemberitaan untuk menumbuhkan kultur dan mengkonsolidasikan demokrasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik.

Di Indonesia, bencana alam adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan. Karena itu, jurnalis dan media berperan penting dalam peliputan dan pemberitaan mengenai bencana alam dan segala aspek yang berhubungan dengan bencana. Peliputan dan pemberitaan mengenai bencana alam, dari potensi, mitigasi, hingga penanganan bencana penting untuk penyadaran, pendidikan, dan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat yang berada di daerah potensial dan rawan bencana.

Jurnalis dan media memberi masukan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan dan membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana, sekaligus mengoreksi untuk perbaikan. Kekuatan media adalah selain dapat memelihara ingatan secara terus-menerus, juga dapat melibatkan publik untuk memengaruhi proses-proses pembentukan kebijakan dan perbaikan.

Ketika terjadi bencana, jurnalis memberitakan peristiwa dari lokasi, yang sekaligus juga dapat memberikan informasi langsung kepada lembaga-lembaga pemberi bantuan untuk bergerak cepat menolong dan menyelamatkan korban, serta memberikan bantuan secara tepat.

Namun, pemberitaan mengenai bencana juga sering kali sangat bias. Ada berita menyalahkan dan menyudutkan korban, yang dianggap tidak mematuhi anjuran atau peringatan yang kemudian menyebabkan mereka

menjadi korban. Berita juga sering tidak memberikan informasi yang berimbang untuk edukasi kepada masyarakat, tetapi lebih pada mengeksploitasi kejadian-kejadian yang tidak berdampak besar untuk penanganan korban, misalnya berita mengenai penjarahan diulang-ulang, padahal berita mengenai korban, kekurangan tenaga dan bantuan, berita mengenai daerah yang terisolasi adalah hal-hal yang perlu dipublikasi.

Berita mengenai bencana juga tidak memihak korban secara keseluruhan. Media sangat sedikit memuat berita yang menginformasikan kekurangan kebutuhan perempuan, susu dan makanan bayi, penataan penampungan pengungsi yang tidak ramah perempuan, anak, disabilitas, lanjut usia, perempuan hamil, dan perempuan menyusui.

B. MENGUBAH PERSPEKTIF JURNALIS

Berita-berita mengenai bencana alam, termasuk berita mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan umumnya berita yang sangat umum yang menempatkan semua warga dalam kapasitas dan posisi yang sama. Padahal di dalam masyarakat terdapat berbagai kelompok sosial yang mempunyai kondisi khusus dan membutuhkan penanganan yang berbeda ketika terjadi bencana maupun kondisi tanpa bencana.

Di dalam masyarakat terdapat perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, yang sangat rentan menjadi korban bencana. Namun, berita mengenai bencana dan penanganan korban bencana umumnya tidak memotret kelompok-kelompok tersebut. Ini tidak berbeda dengan kondisi tanpa bencana, dimana pemberitaan mengenai perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan sering menempatkan mereka sebagai pihak terhukum.

Hal ini tidak bisa dilepaskan perspektif jurnalis mengenai kelompok-kelompok tersebut. Jurnalis yang tidak mempunyai perspektif HAM, perempuan, gender, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, akan menghasilkan berita yang tidak hanya bias, tetapi juga menempatkan kelompok-kelompok tersebut sebagai pihak yang dieksploitasi, terhukum, dan mendapatkan stigma dan stereotipe. Akhirnya, jurnalis dan media tidak menjadi agen yang mengedukasi dan pencerah bagi masyarakat.



Jurnalis diharapkan membangun kesadaran publik melalui berita. (Foto: Nining Rahayu)

Karena itu, Program JMK Oxfam di Pasigala tidak hanya bermitra dengan jurnalis dan media untuk meliput dan memberitakan program, kegiatan, dan berbagai keberhasilannya, tetapi juga berupaya untuk mengubah perspektif jurnalis dalam meliput dan memberitakan perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Pada 5 Maret 2020 JMK Oxfam menyelenggarakan Dialog Publik dengan jurnalis yang mengangkat topik “Jurnalisme Berperspektif Gender”. Dialog menghadirkan narasumber Iwan Lapasere, Koordinator Wilayah IV AJI (Aliansi Jurnalis Independen) dan Ichan, *Protection Officer* JMK Oxfam.

Kegiatan seperti ini diharapkan mengubah perspektif jurnalis dalam meliput dan memberitakan perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan. Jurnalis diharapkan tidak memberitakan peristiwa yang mengeksploitasi tubuh perempuan, mencap dan memberi label anak, mengeksploitasi kondisi disabilitas dan kelompok rentan, tetapi menggunakan perspektif HAM, gender, anak, dan inklusi untuk membangun kesadaran publik dalam pemenuhan hak-hak dan perlindungan pada kelompok-kelompok tersebut.

Jurnalis dan media perlu menghindarkan penggunaan diksi yang menempatkan korban pada posisi dirugikan atau menghukum korban, dan menjauhkan pembaca dari kenyataan serta mereduksi fakta yang sebenarnya. Misalnya berita mengenai kekerasan seksual atau perkosaan yang menggunakan diksi berikut: “cabul/pencabulan”, “pelecehan seksual”, “digilir”, “digagahi”, “disetubuhi”, “ditiduri”, “asusila”, “melayani nafsu”, dan “melampiaskan nafsu birahi” (Palulungan et al., 2020). Penggunaan diksi yang demikian, terutama perempuan dan anak yang menjadi korban, sesungguhnya semakin menempatkan kaum perempuan ke dalam kelompok yang tidak berdaya dalam struktur kekuasaan laki-laki. Sebab berbagai kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti perkosaan, dibahasakan secara halus dalam jurnalisisme (maskulin). Sehingga apa yang menjadi tragedi bagi perempuan dan anak tidak dikonstruksi secara utuh dalam bahasa pers, dan sebaliknya justru cenderung berubah menjadi hiburan semata. Dengan demikian, selain tidak edukatif, berita dengan diksi-diksi tersebut sulit melahirkan keprihatinan, simpati, dan empati masyarakat terhadap korbannya. Sebab masyarakat beranggapan bahwa perkosaan dianggap sesuatu yang biasa, remah, dan lucu. Akhirnya berita-berita perkosaan hanya akan menumpulkan daya kritis dan rasa solidaritas kemanusiaan pembaca terhadap perempuan dan anak korban perkosaan (Abar, 1998).

Mengubah perspektif jurnalis untuk meliput dan membuat berita mengenai perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan yang lebih humanis, edukatif, membangun keprihatinan dan daya kritis masyarakat, adalah penting dan menjadi tanggung jawab semua pihak yang bekerja untuk kemanusiaan. Program JMK Oxfam tidak hanya membutuhkan jurnalis untuk publikasi program dan kegiatan, tetapi juga berkontribusi untuk pemberitaan yang berperspektif perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan.

Pada momen peringatan 16 HAKTP 2020 JMK Oxfam juga melaksanakan diskusi dengan jurnalis bertema “Membangun Komitmen Jurnalis untuk Terlibat dalam Gerakan Bersama Mendukung Pengesahan RUU PKS”. Diskusi dilaksanakan di Hotel Best Western, 02 Desember 2020 yang dihadiri aktivis dan jurnalis dengan narasumber Nining Rahayu dari LBH APIK Sulawesi Tengah dan Program JMK Oxfam.

Menurut Nining, Indonesia berada dalam darurat kekerasan seksual karenanya kita butuhkan instrumen hukum yang lebih progresif untuk mencegah kondisi tersebut. RUU PKS tidak hanya melingkupi pemerkosaan, tapi juga prostitusi paksa, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi yang merupakan bagian dalam kekerasan seksual. RUU PKS penting disahkan karena mengakomodir secara spesifik hak-hak perempuan. RUU PKS penting didorong sebagai jaminan perlindungan perempuan dan anak perempuan terbebas dari kekerasan seksual. Saat ini mungkin kita atau saudara-saudara kita belum jadi korban, tapi tidak ada yang bisa menjamin itu tidak terjadi di masa depan jika tidak ada aturan hukum dan perlindungan dari negara. Karena semua orang rentan terhadap kekerasan seksual maka kita harus bersama-sama mendukung RUU-PKS masuk dalam Prolegnas untuk disahkan. Jurnalis dan media memiliki peran yang paling besar dalam memberitakan dan membangun opini publik untuk mendukung gerakan bersama pengesahan RUU PKS.

Jurnalis yang mempunyai perspektif perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan akan melihat RUU PKS sebagai sebuah isu besar dan pekerjaan besar kemanusiaan yang perlu didukung. Karena itu, RUU PKS mesti diberitakan terus-menerus dalam berbagai sisi untuk mengubah perspektif dan memengaruhi politisi untuk mengesahkan RUU PKS tersebut.

SENARAI PUSTAKA

- Abar, A. Z., 1998. *“Tragedi Perempuan dalam Konstruksi Bahasa Pers.”* dalam Mukhotib MD., Editor, *Menggagas Jurnalisme Sensitif Gender*. PMII Komisariat IAIN Sunan Kalijaga-Pact INPI, Yogyakarta.
- Arif, Ahmad, 2020. *“Tsunami pada Bulan Desember.”* Kompas, 16/12, Jakarta:5.
- Diposaptono, Subandono & Budiman, 2008. *Hidup Akrab dengan Gempa dan Tsunami*. PT Sarana Komunikasi Utama, Bogor.
- Kordi K, M.G.H., 2015. *Durhaka Kepada Anak*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- , 2018. *Perempuan di Tengah Masyarakat dan Budaya Patriarki*. Spektrum Nusantara, Yogyakarta.
- Nugroho, R., 2008. *Gender dan Administrasi Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Palulungan, L., M.G.H. Kordi, M.T. Ramli, Y. Yunus, & I. Fattah, 2020. *Mengubah Lewat Berita: Jurnalisme Berperspektif Perempuan, Anak & Disabilitas*. Yayasan BaKTI, Makassar.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana.

PROFIL ANGGOTA JEJARING MITRA KEMANUSIAAN

Pada Respon Pemulihan Pasca Tanggap Darurat di Palu, Sigi dan Donggala

Jejaring Mitra Kemanusiaan (JMK) beranggotakan 23 lembaga. Tujuan besar JMK adalah tersedianya pusat jejaring pengetahuan yang menata kelola pembelajaran dan praktek baik dari organisasi mitra, sehingga masing masing organisasi mitra secara independen dan terus menerus meningkat kapasitas teknis dan manajemennya dalam memberikan bantuan teknis, pendampingan, dan advokasi untuk pengelolaan bencana dalam arti yang luas secara lebih bertanggung jawab, lebih inklusif, dan lebih responsif gender.

Untuk mencapai semangat tersebut, JMK membagi peran dan fungsi lembaga anggota JMK melalui kompetensi masing-masing untuk mencapai pilar organisasi. Pilar-pilar organisasi, yakni: Pilar I Humanitarian, Pilar II Advokasi Berbasis Bukti, dan Pilar III Dukungan untuk Meningkatkan Kinerja dan Keberlanjutan Organisasi. Tiga pilar bukan merupakan tematik yang terpisah, tetapi merupakan bagian yang saling berkaitan dan memengaruhi. Proses implementasi kerja-kerja JMK dimulai dalam Pilar I (Humanitarian) melalui kebutuhan respon darurat dan kesiapsiagaan bencana, dimulai sejak bencana Erupsi Gunung Agung Bali, Gunung Merapi Yogyakarta, Banjir Bandang Makassar, Tsunami Selat Sunda, Gempa Lombok dan Gempa Sulteng, dimana proses respon bencana, dan khususnya Gempa Sulteng merupakan bagian dari kerja-kerja Pilar I (Humanitarian). Berikut 15 anggota JMK yang berkontribusi pada Respon Pemulihan Tanggap Darurat di Palu, Sigi, dan Donggala.



PKBI PERKUMPULAN
KELUARGA
BERENCANA
INDONESIA
DAERAH SULAWESI TENGAH

Alamat:

Jl. Pue Bongo Lrg Lekatu
No. 07 Palu, Sulawesi
Tengah

Telpon/Fax :

0812 4214 9998
0451-452 178

Email :

pkbisulteng@pkbi.or.id,
pkbisulteng@yahoo.com,
kirim4u@yahoo.com

Kontak Person :

Yospina Liku La'bi, SE, MA

Mobile :

0812 4214 9998

PKBI Sulawesi Tengah berdiri tahun 1986, sudah melakukan kegiatan respon bencana sejak tahun 1998 saat kejadian Konflik Poso, Tsunami Aceh, kemudian gempa Sumatra Barat, kabut asap di Palembang, banjir bandang di Garut, gempa dan merapi di Yogyakarta, gempa di Lombok, dan saat ini adalah respon gempa, tsunami dan likuefaksi di Palu, Sigi, dan Donggala. Program Kemanusiaan PKBI memiliki komitmen dan dedikasi tinggi dalam mengembangkan program kemanusiaan PKBI sebagai upaya menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat masalah-masalah kesehatan seksual dan reproduksi bagi kelompok rentan (maternal, neonatal, kekerasan seksual dan komplikasi lanjutan, infeksi menular seksual, penanganan korban GBV, penyebaran virus HIV dan Keluarga Berencana pada saat dan pasca bencana.

Dalam melaksanakan respon bencana dibentuk Team Kemanusiaan PKBI (TKP) bertugas melakukan program kemanusiaan dalam penanggulangan bencana terkait Kebutuhan dasar manusia khususnya kebutuhan akan air bersih, sanitasi dan kesehatan lingkungan, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi, serta dampak sosial lainnya. TKP terdiri dari staf dan relawan berdasarkan pemenuhan kriteria dan pernyataan kesediaan menjadi anggota TKP yang terdiri dari: relawan medis, relawan non medis, relawan remaja serta relawan mitra



PKBI PERKUMPULAN
KELUARGA
BERENCANA
INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

Alamat:

Jl. Majapahit No.11A
Mataram- 83125

Telpon/Fax :

0370-784 4163

Website :

www.pkbi.or.id
www.pkbinb.com

Kontak Person :

Yahmad Hidayat, S.Pd

Email :

dayatkimia@gmail.com

Mobile :

0831 2939 7769

PKBI NTB berdiri tahun 1969, yang memiliki konsen bekerja dengan isu kesejahteraan keluarga yang terfokus pada program pemberdayaan dalam mendekatkan akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) baik dalam situasi normal dan situasi krisis (bencana). Sampai saat ini, dalam setiap program berbasis masyarakat selalu menggunakan pendekatan yang apresiatif dengan memegang prinsip pemenuhan HKSR dan Gender yang transformatif.

Secara kelembagaan, PKBI NTB diperkuat dengan sistem manajemen yang baik meliputi struktur organisasi lengkap (Direktur, HRD, Finance, PMEL, Project, Logistik, Advokasi) dan keuangan yang akuntabel (sistem SAKU). Dengan ini, PKBI NTB memiliki pengalaman kerjasama dengan UNICEF, Kementerian PPPA, Kementerian Sosial, UNFPA Indonesia, Global Fund, JOICFP, Social Minister, GIZ, dan Oxfam Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir PKBI NTB bekerja dengan isu perkawinan anak, gender dan kebencanaan dengan tidak terlepas pada pemenuhan HKSR. PKBI memulai sebuah program pemberdayaan dengan terlebih dahulu melakukan kajian situasi umum daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan koordinasi dengan pihak terkait. Selanjutnya, pemberdayaan dengan membangun kesadaran masyarakat dan mendorong terjadinya mobilisasi sosial dengan bertumpu pada kekuatan dan potensi masyarakat dan gender yang transformatif. Memperkuat kesadaran masyarakat dengan penguatan sistem jaringan dan rujukan yang responsif dan ramah, serta penguatan kebijakan dengan koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kebijakan (mendorong program-program yang terintegrasi).



PKBI PERKUMPULAN
KELUARGA
BERENCANA
INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN

Alamat:

Jl. Andi Djemma No. 5
Makassar, Sulawesi
Selatan-90135

Website :

www.pkbisulsel.org

Kontak Person :

Andi Iskandar Harun

Email :

nda.makassar@gmail.com

Mobile :

0811 444 176

PKBI Sulawesi Selatan berdiri tahun 1968, fokus pada: (1) Pemberdayaan remaja. Semua anak dan remaja memahami dan mampu membuat keputusan secara bertanggung jawab dan mempraktekkan kesehatan reproduksi dan seksual serta hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual yang berkesetaraan dan berkeadilan gender; (2) Memperluas akses informasi, edukasi dan pelayanan yang berkualitas. Semua orang terutama orang miskin, marginal dan tidak terlayani dapat memahami hak reproduksi dan seksual serta mempunyai akses untuk mendapatkan informasi, pelayanan yang berkualitas serta hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual; (3) Mengembangkan upaya pemenuhan kesehatan ibu dan anak. Mengupayakan penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan status gizi buruk dan gizi kurang, melalui intervensi penguatan pelayanan tingkat dasar (posyandu) dan pemberdayaan kader dan masyarakat; (4) Mengembangkan upaya pencegahan dan penanggulangan IMS, HIV, dan AIDS. Menurunnya angka IMS dan menghambat peningkatan kasus baru HIV/AIDS, memberikan perlindungan serta mengurangi stigma dan diskriminasi ODHA/OHIDA; (5) Mengembangkan upaya penanganan KTD. Semua orang mempunyai pengetahuan, memperoleh akses dan mendapatkan pelayanan yang memadai berkenaan dengan berbagai alternatif penanganan KTD; (6) Advokasi. Adanya dukungan politik dan publik yang kuat untuk program kesehatan reproduksi dan seksual serta hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual bagi semua orang dengan ditetapkannya undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.



PKBI PERKUMPULAN
KELUARGA
BERENCANA
INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN

Alamat:

Jl. Kol. H. Burlian/
Mahkamah Militer Km 6
Palembang.

Telepon :

0711-420-786; 421-692

Kontak Person :

Nindi Nupita, SE

Email :

pkbisumsel@gmail.com
pkbisumsel@yahoo.com

Mobile :

0812 7833 535

PKBI Sumatera Selatan berdiri tahun 1957. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir bekerja dengan isu pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan reproduksi, penerimaan sosial dan advokasi. PKBI Sumatera Selatan mempunyai tim manajemen yang baik dan kuat serta berpengalaman dalam menjalankan program bersama lembaga nasional maupun internasional dalam berbagai program antara lain: UNDP, UNICEF, ILO, UNFPA, Fathfinder International, The British Council, ASA/FHI, Global Fund, The Asia Foundation, Japan Embassy, Oxfam – Novib, dan Oxfam Indonesia maupun lembaga lokal/CSR seperti Pemprov Sumsel, Pemkot Palembang dan Conocco Philips Indonesia. PKBI Sumsel memiliki sekretariat tetap dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan operasional dalam pelaksanaan program. Beberapa program yang sedang dilaksanakan saat ini seperti: (a) Program klinik; (b) Program kesehatan ibu dan anak melalui Posyandu; (c) Program peduli anak menjalani pidana penjara (AMPP); (d) Program HIV-AIDS, penjangkauan dan pendampingan pada kelompok resiko tinggi pekerja seks perempuan; (e) Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi ODHA; (f) Program Remaja *Youth Centre* (Pusat Informasi dan Pelayanan Remaja).

Dalam pelaksanaan tersebut, PKBI melibatkan relawan dari berbagai jenjang dan disiplin, mulai dari tingkat daerah sampai pada tingkat lapangan atau grass roots. Semangat relawan dalam melaksanakan kegiatan meliputi empat aspek

yakni; semangat kepeloporan, profesionalisme, kemandirian dan kerelawanan yang menjadi modal dan faktor pendorong utama bagi setiap anggota (relawan) perkumpulan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, mandiri dan bertanggung jawab “*responsible parenthood*” dengan visi pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi dan seksual serta hak-haknya yang berkesetaraan dan berkeadilan gender.



Alamat:

Jl. Vetnai 17 Kel. Oebufu,
Kec. Oebobo, Kupang,
Nusa Tenggara Timur-
85111

Website :

www.cistimor.or.id

Kontak Person :

Haris A. Ch. Oematan

Email :

oematanharis@gmail.com

Mobile :

0821 45756 9796

Perkumpulan Relawan CIS Timor berdiri tahun 2009. Dalam 10 tahun terakhir CIS Timor bekerja dengan isu pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat yang terfokus pada program penyediaan akses dan tata kelola air bersih di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan tergabung dalam pengurus Dewan Air dan Pokja Air Minum Penyehatan Lingkungan NTT. Melakukan kajian dan koordinasi masyarakat desa di sepanjang 3 DAS besar yakni DAS Benanain, Noelmina dan Noemuke di Timor untuk mitigasi dan adaptasi bencana. Membangun model usaha pertanian berbasis agroekosistem hulu, tengah dan hilir pada wilayah DAS dan Sub DAS. Bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemda NTT dan Pemkab Sabu Raijua membangun masyarakat yang tahan iklim. Memfasilitasi penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kupang dan TTS yang sensitif terhadap pengelolaan ekosistem berkelanjutan, pengurangan resiko bencana dan adaptasi

terhadap perubahan iklim. CIS Timor juga fokus pada kegiatan pemberdayaan ekonomi petani/peternak kecil, miskin dan korban konflik di wilayah Timor.

Saat ini CIS Timor telah memiliki manajemen yang kuat karena memiliki pengalaman berprogram bersama lembaga PBB (UNHCR, UNICEF, UNDP, ILO) donor negara seperti USAID, AUSAID, NZAID dan Uni Eropa, dengan NGO internasional, pemerintah, CSR swasta, dengan mekanisme kerja langsung maupun dengan model konsorsium



Alamat:

Perumahan Bumi
Cemerlang No B5. RT 11
RW 4 Kel. Tegalrejo, Kec.
Tegalrejo, Yogyakarta-
55244

Telepon :

0751 8970723

Website :

www.aksara-jogja.net

Kontak Person :

Anggoro Budi Prasetyo

Email :

angieprast@gmail.com

Mobile :

0819 3175 5797

Perkumpulan AKSARA berdiri tahun 2007. Dalam 10 tahun terakhir Perkumpulan Aksara bekerja dengan isu pengarusutamaan gender dalam tata kelola pemerintahan dan juga kebencanaan serta adaptasi perubahan iklim berbasis masyarakat yang terfokus pada program perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di DIY dan program PRB berbasis masyarakat yang bekerjasama dengan BPBD dan BNPB. Melakukan kajian dan koordinasi masyarakat desa terdampak bencana terutama kelompok perempuan dalam kegiatan kewirausahaan pasca bencana berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten/Kota di Yogyakarta serta KPPPA.



JEMARI Sakato

Alamat:

Jl. Singgalang II No. 16, RT. 01/RW.01, Alai Parak Kopi, Kel. Gunung Pangilun, Kec. Padang Utara, Padang, Sumatera Barat-25172

Telepon :

0751-897 0723

Website :

www.jemarisakato.org

Kontak Person :

Robi Syafwar

Email :

obiona080315@gmail.com

Mobile :

0852 6335 6301

JEMARI Sakato berdiri tahun 2004, dan mengembangkan empat kompetensi untuk menjalankan berbagai kegiatan dan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak, yang meliputi: (1) Riset aksi dan fasilitasi menuju tata pemerintahan yang lebih baik (termasuk advokasi perencanaan dan penganggaran daerah yang terintegrasi); (2) Advokasi kebijakan dan anggaran yang berkeadilan; (3) Monitoring dan evaluasi program/kebijakan bagi perbaikan pelayanan publik; dan (4) Pengembangan metodologi fasilitasi yang efektif, interaktif dan partisipatif.

Tim JEMARI Sakato terbiasa menggunakan pendekatan *Appreciative Inquiry*, penggunaan metode penyusunan kegiatan dan monitoring yang partisipatif, seperti; TOP (ORIK, *Participatory Workshop, Action Plan*), *Participatory Rapid Appraisal (PRA)*, *Ziel Orientierte Projekt Planung (ZOPPP)*, *Cornerstone, Bisnis Canvas Model, Balanced Score Card, Fishbone*. Dalam penyusunan rencana strategis dan monitoring/evaluasi juga sangat mahir dalam penggunaan metode *Scenario Planning, Participatory Monitoring and evaluation (PME)*, *Citizen Report Card (CRC)*, *Community Score Card (CSC)*, *Mapping GIS*, dan lain-lain. Keunikan dari lembaga JEMARI Sakato adalah: (1) Mampu memaduserasikan inisiatif dan potensi sumber daya lokal dengan program terobosan yang difasilitasi pemerintah, swasta dan organisasi swadaya untuk kesiapsiagaan, kemandirian dan ketangguhan komunitas; (2) Terbiasa mengintegrasikan

pembelajaran klasikal dengan labor lapangan yang berkontribusi langsung pada pemenuhan indikator kinerja; (3) Mengoptimalkan kemampuan yang ada di daerah program untuk bias menjadi mentor untuk keberlanjutan dan pengembangan selanjutnya; (4) Menggunakan metode pembelajaran terkini, dilengkapi dengan penggunaan aplikasi berbasis GIS dan teknologi informasi dan berorientasi kemandirian dan keberlanjutan; (5) Terbiasa berkolaborasi dengan pihak pemerintah, komunitas dan sektor swasta untuk membangun jejaring yang lebih produktif.



Alamat:

Perumahan Budi Daya
Permai Blok D No. 3
Makassar – 90245

Telepon :

0812 4284 3387

Website :

www.apikmakassar.or.id

Kontak Person :

Rosmiati Sain

Email :

rosmiati.sain@gmail.com

Mobile :

0812 4284 3387

LBH APIK Makassar berdiri tahun 2002, adalah organisasi bantuan hukum yang konsern untuk isu perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya yang mengalami diskriminasi dan kekerasan. LBH APIK Makassar melakukan pendampingan baik secara litigasi maupun non litigasi. Selain itu, juga aktif melakukan pemberdayaan di komunitas dan aktif melatih paralegal untuk membantu kasus-kasus di komunitas. Sejak tahun 2016 LBH APIK Makassar mendapatkan akreditasi dari kementerian Hukum dan HAM dan hingga saat ini mendapatkan Program Bantuan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM/ BPHN. Di tahun 2016 juga menjalankan program Rule of Law and Citizen Right kerjasama Asosiasi APIK Indonesia dan melalui program tersebut membentuk Forum Warga sebagai wadah diskusi dan penanganan kasus pelanggaran hak dasar dan pelayanan publik.



Alamat:

Jl. Trengguli No.85 Penatih
(ATM BNI) Denpasar Timur,
Bali

Telepon :

081 337 325 896

Website :

www.lbhapikbali.weebly.com

Kontak Person :

Luh Putu Nilawati, SH., MH.

Email :

putunila@gmail.com

Mobile :

082 147 147 566

LBH APIK Bali berdiri tahun 2009, fokus memberi pelayanan dan pendampingan hukum untuk perempuan korban kekerasan yang mengalami diskriminasi, melakukan pelatihan, kajian, dan mendorong pemberdayaan hukum masyarakat di Bali. Layanan korban kekerasan perempuan dan anak. Terciptanya sistem hukum yang adil gender, yang tercermin dalam relasi kuasa baik dalam relasi personal, keluarga, masyarakat dan negara. Menguatnya gerakan perempuan sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil dalam pemberdayaan hukum dan masyarakat yang adil gender. Melakukan pendampingan, pembelaan dan bantuan hukum bagi perempuan yang mengalami ketidakadilan gender. Melakukan advokasi untuk perubahan undang-undang dan kebijakan baik yang berkaitan dengan substansi hukum struktur maupun budaya hukum serta perubahan perilaku dan praktik-praktik di dalam masyarakat.

Melakukan pengembangan sumber daya hukum masyarakat, serta ikut mewujudkan akses terhadap keadilan bagi perempuan dan masyarakat miskin. Membangun dan memperkuat jaringan kerja dengan berbagai organisasi non pemerintah dan pemerintah. Mendorong terbentuknya lembaga-lembaga pengadaan pelayanan di Provinsi Bali. Memperkuat kapasitas kelembagaan di Tingkat Sekretariat LBH APIK-Bali. Memberikan penyuluhan hukum, pelatihan dan pemberdayaan sumber daya hukum kepada

masyarakat dan aparat penegak hukum baik dalam penanganan korban maupun upaya pencegahan. Melakukan kajian kritis dengan perspektif gender dan HAM terhadap berbagai undang-undang, kebijakan dan peraturan lainnya serta melakukan penyusunan, pembuatan, penyebarluasan serta pendokumentasian berbagai informasi tentang kasus-kasus yang ditangani.



Alamat:

Jl. Teluk Tomini No 8B, Kel.
Lolu Utara, Kec. Palu Timur,
Palu, Sulawesi Tengah

Website :

www.ylbhapiksulteng.org

Kontak Person :

Nining Rahayu

Email :

rahayunining89@gmail.com

Mobile :

082144706715

Sejak berdiri pada tanggal 6 september 2009 hingga hari ini LBH APIK Sulteng berkerja pada isu perempuan, anak, dan kelompok rentan di Sulawesi Tengah, yang membutuhkan pendampingan kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, kasus hak-hak dasar dan layanan publik dan kekerasan lainnya. Melakukan pendampingan penguatan kapasitas komunitas dengan melakukan penyuluhan hukum terkait kekerasan berbasis gender (KGB) dan mekanisme pendampingan KGB, membentuk Sekolah Pelopor Keadilan yang menjadi wadah perempuan untuk belajar tentang kesadaran gender, keberagaman gender, hak-hak dasar dan inklusi sosial serta advokasi kebijakan. Membentuk Forum Warga sebagai wadah untuk mendiskusikan persoalan-persoalan yang terjadi didesa dan melakukan advokasi bersama. LBH APIK dalam empat tahun terakhir juga fokus terhadap isu lingkungan dengan melakukan pendampingan dan penguatan

kapasitas perempuan di lingkaran tambang galian C di wilayah Donggala.

Saat ini LBH APIK sudah memiliki manajemen yang kuat karena memiliki pengalaman berprogram bersama lembaga Oxfam lewat program *Gender Justice*, TAF lewat program mendorong pemenuhan akses informasi dan mekanisme komplek warga terhadap pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi Tengah, Kedutaan Belanda lewat program *Rule of Law and Citizen Right*, dengan mekanisme kerja langsung dengan lembaga donor internasional ataupun lewat konsorsium bersama asosiasi APIK Indonesia dan konsorsium ADARA NTB. Serta membangun mekanisme rujukan kasus bersama pemerintah daerah lewat P2TP2A provinsi dan kabupaten/kota serta lembaga layanan lainnya.



Alamat:

Jl. Tunjung No. 10, Baciro,
Kec. Gondokusuman,
Yogyakarta, DI Yogyakarta-
55225

Website :

perkumpulanidea.or.id

Kontak Person :

Tenti Novari Kurniawati

Email :

tentikurniawati@gmail.com

Mobile :

0817 9401 340

IDEA berdiri tahun 1995. Sebagai organisasi non-pemerintah memutuskan untuk menjadi bagian transformasi sosial di Indonesia. Satu dekade terakhir ini, perubahan dramatis terjadi dalam tata pemerintahan di Indonesia sehingga menjadi lebih terbuka dan demokratis. Namun perubahan ini belum tentu menjamin akses kelompok-kelompok rentan terhadap sumber daya, karena pada saat yang sama, tarik-menarik kekuatan yang bekerja pada kebijakan publik di Indonesia tidak searah dengan kepentingan kelompok rentan.

IDEA menfokuskan energinya pada pendidikan populer dan advokasi kebijakan anggaran dan tata

kelola pemerintahan yang demokratis di tingkat pusat serta daerah. Kebijakan anggaran adalah kebijakan yang mengatur alokasi, distribusi, dan stabilisasi sumber-sumber daya publik. Dengan demikian maka kebijakan anggaran sangat strategis untuk mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan milenium, kesetaraan & keadilan gender, pengurangan risiko bencana atau pun untuk pemenuhan hak-hak dasar warga. Kebijakan anggaran pada akhirnya menjadi kebijakan politik karena banyaknya pihak yang berkepentingan atas ketersediaan sumber daya publik yang terbatas. Untuk menjamin pemenuhan hak-hak asasi kelompok rentan, maka dibutuhkan sistem kebijakan anggaran yang deliberatif. Dorongan untuk pewujudan kebijakan ini membutuhkan keberdayaan dan keterlibatan masyarakat sipil dalam kebijakan publik.

Citra Diri IDEA: Perkumpulan idea adalah organisasi yang bergerak dalam hal riset, advokasi, konsultansi, peningkatan kapasitas dan pengorganisasian basis dengan keberpihakan ditujukan kepada kelompok rentan yang terhalang aksesnya terhadap pelayanan hak-hak dasar. Sumber pendanaannya berasal dari iuran anggota, hibah pegiat, pengelolaan IRC (Idea Resourcer Center) dan dukungan pihak lain yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip organisasi. Dengan wilayah kerja mencakup lokal (Desa, Kabupaten/Kota dan Provinsi), Nasional, dan Global.

IDEA memiliki manajemen organisasi yang kuat dimana organ-organ organisasi bekerja dengan baik sebagaimana aturan main yang sudah ditetapkan dalam AD/ART, dimana forum musyawarah dan pengambilan keputusan

tertinggi melalui rapat anggota. Struktur organisasi terdiri dari Dewan Konstituante, Dewan Pengawas, dan Badan Pengurus. IDEA memiliki misi strategis mewujudkan IDEA sebagai lembaga yang memiliki tata kelola organisasi masyarakat sipil yang baik.



Alamat:

Perum sukasenang Blok E
No. 36 RT 01/R 06 Desa
Pamekarsari, Kec.
Banyuresmi, Garut, Jawa
Barat

Telepon :

021-7918-3221; 7918-3444

Website :

www.koalisiperempuan.or.id

Kontak Person :

Risnawati

Email :

priyatnorisnawati@gmail.com

Mobile :

0853 2287 1101

KPI Garut berdiri tahun 2004, menjadi agen perubahan yang membela hak-hak perempuan dan kelompok yang dipinggirkan, kelompok pendukung sesama perempuan, kelompok pengkaji, pengusul untuk perubahan kebijakan pemberdayaan hak politik perempuan, motivator dan fasilitator jaringan kerja antar organisasi kelompok dan individu perempuan unsur penting dalam gerakan masyarakat sipil untuk keadilan dan menjadi agen pencegahan tindak pidana perdagangan orang disuport oleh KPPPA. Dalam 3 tahun ini pasca banjir bandang Garut, KPI terlibat respons bencana bersama beberapa lembaga NGO diantaranya Oxfam Indonesia, Wahana Visi Indonesia, Mercy Corp, Caritas Indonesia dan SOS *Children Village* Indonesia dan terlibat dalam respon banjir bandang Bima dan Gunung Agung Bali pada sektor WASH. KPI Garut juga terlibat mendorong kebijakan pemerintah untuk merevisi UU perkawinan terkait batas usia pernikahan menjadi 19 tahun untuk anak laki-laki dan perempuan, serta ikut serta mendampingi perancangan, pembuatan program Gubernur Jawa Barat di bidang POKJA DPPPAB (terbentuk Sekolah Perempuan capai impian dan cita-cita Jawa Barat).



Alamat:

Jl. Dandang Gendis, Perum
Pondok Doko Indah, Blok
A. No. 1 Doko, Kediri, Jawa
Timur

Website :

www.suarindonesia.org

Kontak Person :

Sanusi

Email :

sanusi_lantung@yahoo.com
suarkediri@yahoo.co.id

Mobile :

0813 3390 0069
0811 3674 114

SuaR berdiri tahun 2006. SuaR sangat ahli dalam program pengembangan masyarakat dengan pendekatan pengorganisasian dan membentuk organisasi masyarakat (CBO) di komunitas khususnya isu kesehatan dan kebencanaan, serta melakukan advokasi kebijakan pada tingkat komunitas dan kabupaten/kota. SuaR dengan dukungan USAID mendorong Perda dengan sistem kesehatan ibu dan anak, dukungan KPPD Jatim mendorong Perda perlindungan perempuan dan anak, serta dukungan Oxfam untuk Perda SOTK BPBD dan Perda peangulangan bencana berbasis gender di Kabupaten Kediri. Dalam respon bencana yang pernah dilakukan SuaR adalah bencana banjir di Sampang, Bojonegoro dan Tuban dengan pendekatan MBICT4D (*Market Bank Information and Communication for Disaster*), juga respon bencana di erupsi Bali, gempa Lombok dan bencana Palu. Peran SuaR selain *assessment* awal juga pada sektor WASH dan *livelihood*. SuaR menginisiasi terbentuknya FPRB di tingkat Kabupaten Kediri, dengan melibatkan perempuan sebagai mandat Perda Penanggulangan Bencana Berprespektif Gender serta menjadi terlibat di FPRB Propinsi Jawa Timur.

SuaR Indonesia memiliki management bertumbuh lebih kuat dengan berpengalaman dengan mengelola program dari lembaga donor antara lain USAID yang bermitra dengan FHI, LGSP dan HSP,

Global Fund dan Oxfam untuk advokasi kaitan dengan kebencanaan. Bersinergi dengan pemerintah untuk mendorong kabupaten dan kota sehat serta Forum Komunitas Hijau. Berkerjasama dengan privat sektor sanitasi dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dalam merespon adaptasi perubahan iklim. SuaR juga anggota SA Konsorsium JMK (Jaringan Mitra kemanusiaan) mulai tahun 2016 dalam respon bencana khususnya sektor *livelihood* dan WASH



Alamat:

Jl. Stella III No. 88 Kel.
Simpang Selayang, Kec.
Medan Tuntungan,
Medan, Sumatera Utara-
20135

Telepon :

061- 836 7438

Website :

www.kksp.or.id

Kontak Person :

Sri Eni Purnamawati

Email :

[srieni.purnamawati@
gmail.com](mailto:srieni.purnamawati@gmail.com)

Mobile :

081 165 4603

KKSP berdiri tahun 1987. Kesiapsiagaan KKSP dalam menghadapi berbagai peristiwa kebencanaan, baik kebencanaan yang disebabkan alam (natural disaster) seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran dan lain-lain, maupun kebencanaan yang disebabkan manusia (human made disaster), seperti konflik sosial dan politik. Tujuan utama kesiapsiagaan bencana adalah memberikan perlindungan bagi anak dan kelompok rentan seperti anak, perempuan, orang tua dan penyandang kebutuhan khusus (disabilitas).



Sapda

Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak

Alamat:

Perumahan Pilahan Permai
Blok C-39 Rejowinangun,
Kotagede, Yogyakarta-
55171

Telepon :

0274-284 1999

Website :

www.sapdajogja.org

Kontak Person :

Rr. Nurul Saadah Andriani,
SH, MH

Email :

info_sapda@yahoo.com

Mobile :

0856 2914 654

Yayasan SAPDA berdiri tahun 2005. Selama 14 tahun terakhir aktif melakukan advokasi isu-isu disabilitas dan inklusi sosial melalui berbagai cara dan sektor. Konsistensi SAPDA dalam mengawal isu dapat dilacak melalui berbagai sumber, baik komunitas disabilitas, pemerintah, maupun lembaga-lembaga/organisasi dimana SAPDA pernah bersinggungan baik langsung/tidak langsung. Sebagai salah satu lembaga disabilitas, SAPDA mengambil fokus isu pada perempuan dengan disabilitas dan anak dengan disabilitas. Selama kurun waktu 1 dekade terakhir, SAPDA memiliki tim yang secara khusus menangani isu-isu kekerasan yang terjadi pada perempuan dengan disabilitas, terutama kasus-kasus kekerasan seksual. Dalam hal ini, SAPDA secara mandiri memiliki kapasitas penanganan kasus secara non-litigasi. Sedangkan untuk penanganan litigasi, SAPDA berjejaring dengan pihak-pihak terkait, seperti aparat penegak hukum, psikiater, psikologi, P2TP2A dan jajarannya, serta lembaga-lembaga perempuan. bersamaan dengan jejaring, SAPDA juga turut melakukan advokasi regulasi, baik pada level daerah maupun nasional. RUU PKS adalah salah satu RUU yang hingga saat ini masih terus dikawal SAPDA. Sedangkan untuk di level daerah, SAPDA juga memiliki kapasitas dalam memberikan asistensi kepada pemerintah daerah terkait regulasi yang inklusif. Salah satu contohnya adalah Perda DIY dan Kota Yogyakarta tentang

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (beserta dengan regulasi turunannya), Pemerintah Kabupaten Jember dan kota Banjarmasin dengan Perda Disabilitas. SAPDA saat ini juga tengah fokus untuk menggarap isu GEDSI, di mana dalam konsep GEDSI yang dimiliki SAPDA mencoba untuk mengintegrasikan isu-isu gender dan disabilitas dalam kerangka inklusi sosial dan tidak eksklusif. Terkait dengan isu GEDSI, SAPDA juga memiliki kapasitas dalam memberikan peningkatan kapasitas bagi lembaga/organisasi yang bergerak pada isu-isu serupa.

GEDSI merupakan sebuah metode bagi SAPDA untuk melakukan upaya meng-crosscutting-kan isu disabilitas ke isu-isu lain termasuk isu penanganan bencana, perubahan iklim, pelayanan publik, pemilu, kesehatan reproduksi, kota/desa inklusi dan sebagainya. Terkait dengan hal tersebut SAPDA sudah bekerjasama dengan berbagai pihak dari NGO internasional, nasional, pemerintah pusat/ kementerian dan kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Oxfam dalam penanganan bencana di Palu dengan isu gender disabilitas dan program ICDRC Oxfam dimana SAPDA dalam posisi sebagai mitra *cross cutting* untuk memastikan isu GEDSI ke dalam kerja-kerja partner Oxfam yang lain.

TENTANG PENULIS



M. GHUFRAN H. KORDI K., akrab dipanggil UPAN, OPAN, PAN, GHUF, lahir 26 Januari 1973 di Desa Tabapoma, Bacan, Halmahera Selatan, Maluku Utara, adalah seorang aktivis dan pekerja sosial, peneliti, penulis, pelatih dan fasilitator pelatihan, guru/pendidik, narasumber/pembicara, konsultan pemberdayaan masyarakat, akuakultur (budi daya perairan/perikanan), dan lingkungan.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh, antara lain SD Negeri, Tabapoma; Madrasah Ibtidaiyyah Alkhairaat, Tabapoma; Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Kalumpang, Ternate; Madrasah Aliyah Alkhairaat Kalumpang, Ternate, Maluku Utara; Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar; dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial (STIKS) Tamalanrea, Makassar.

Bapak dua anak—RYZA MAURYZ H. KORDI K & IZZAH MAURYZA H. KORDI K—ini dikenal sebagai seorang ensiklopedis, karena bidang yang digelutinya begitu luas. Selain menggeluti ilmu-ilmu perikanan, kelautan, dan ekologi (lingkungan), juga mendalami kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial, ketenagakerjaan, sosiologi, hak dan perlindungan anak, gender dan hak perempuan, hak kelompok minoritas dan disabilitas, dan pemberdayaan masyarakat. Dia selalu berpesan “Buatlah jejak dan ukirlah nama, supaya dunia tahu, kita pernah hidup”.

Belajar menulis sejak di bangku Madrasah Aliyah Alkhairaat, Ternate. Hingga kini terus menulis dan telah menghasilkan ratusan artikel, esai, makalah, laporan penelitian, naskah akademik, kertas posisi, policy brief, draft Raperda, draft RPJMD, draft Renstra SKPD, draft Rencana Aksi Daerah (RAD), modul/panduan pelatihan, dan buku yang mencakup bidang-bidang di atas.

Buku yang ditulisnya telah mencapai sepuluh lusin dan diterbitkan—dalam bentuk cetak dan e-book—beberapa penerbit di Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Jakarta, Bandung, dan Makassar. Beberapa bukunya telah menjadi buku teks dan buku rujukan di Perguruan Tinggi, antara lain:

- Parameter Kualitas Air (Karya Anda, Surabaya).
- Penanggulangan Hama dan Penyakit Ikan (PT. Rineka Cipta, Jakarta).
- Pengelolaan Kualitas Air dalam Budi Daya Perairan, ditulis bersama Andi Baso Tancung (PT. Rineka Cipta, Jakarta).
- Ekosistem Terumbu Karang (PT. Rineka Cipta, Jakarta).
- Ekosistem Lamun (PT. Rineka Cipta, Jakarta).
- Ekosistem Mangrove (PT. Rineka Cipta, Jakarta).
- Akuakultur Intensif dan Super Intensif: Produksi Tinggi dalam Waktu Singkat (PT. Rineka Cipta, Jakarta).
- Budi Daya Perairan, Buku Kesatu (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung).
- Budi Daya Perairan, Buku Kedua (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung).
- Meramu Pakan untuk Ikan Karnivor (CV. Aneka Ilmu, Semarang).
- Pembenihan Ikan Laut Ekonomis Secara Buatan, ditulis bersama Andi Tamsil (Lily Publisher, Yogyakarta).
- Marikultur: Prinsip dan Praktik Budi Daya Laut (Lily Publisher, Yogyakarta).
- Budi Daya 22 Komoditas Laut untuk Konsumsi Lokal dan Ekspor (Lily Publisher, Yogyakarta).
- Buku Pintar Budi Daya 32 Ikan Laut Ekonomis (Lily Publisher, Yogyakarta).
- Farm Bigbook: Budi Daya Ikan Konsumsi di Air Tawar (Lily Publisher, Yogyakarta).
- Farm Bigbook: Budi Daya Komoditas Perikanan Laut Unggulan, Populer, & Prospektif (Lily Publisher, Yogyakarta).
- Biologi Perikanan: Kajian & Aplikasi Praktis, ditulis bersama Andi Tamsil, Hasnidar Yasin, dan Thamrin Ali Ibrahim (Lily Publisher, Yogyakarta).
- Iktiologi: Dunia Ikan, ditulis bersama Andi Tamsil, Thamrin Ali Ibrahim, dan Azis Husen (Lily Publisher, Yogyakarta).

- Pakan Ikan (PT. Perca, Jakarta).
- Hak dan Perlindungan Anak (PT. Perca, Jakarta).
- Ironi Pembangunan (PT. Perca, Jakarta).
- Membangun Kesadaran Kritis (PT. Perca, Jakarta).
- Pengelolaan Perikanan Indonesia (Pustaka Baru Press, Yogyakarta).
- Manusia Sekolah dan Sekolah Manusia (Pustaka Baru Press, Yogyakarta).
- Durhaka Kepada Anak: Refleksi mengenai Hak dan Perlindungan Anak (Pustaka Baru Press, Yogyakarta).
- Hak Asasi Manusia tentang Hak Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Umum (Graha Ilmu, Yogyakarta).
- Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan, Pengungsi, Keluarga, Anak, dan Perempuan (Graha Ilmu, Yogyakarta).
- Hak Asasi Manusia tentang Diskriminasi, Perbudakan, Peradilan, Kejahatan Kemanusiaan, dan Perang (Graha Ilmu, Yogyakarta).
- Perempuan di Tengah Masyarakat dan Budaya Patriarki (Graha Ilmu, Yogyakarta).
- Gunung dan Sungai dalam Al-Quran (Pustaka Diniyah, Yogyakarta).
- Angin, Awan, dan Hujan dalam Al-Quran (Pustaka Diniyah, Yogyakarta).
- Laut dan Air dalam Al-Quran (Pustaka Diniyah, Yogyakarta).
- Beragama Inklusif untuk Kesetaraan dan Kemanusiaan (Pustaka Diniyah, Yogyakarta).
- Mengenal dan Mengelola Terumbu Karang (PT. Indeks, Jakarta).
- Mengenal dan Mengelola Padang Lamun (PT. Indeks, Jakarta).
- Pakan Udang (Akademia, Jakarta).
- Akuakultur Jilid 1 (PT. Indeks, Jakarta).
- Akuakultur Jilid 2 (PT. Indeks, Jakarta).

Masukan, kritik, koreksi, dan konsultasi dapat disampaikan kepada penulis melalui email: hkordik@gmail.com.

KONTRIBUTOR

- **Dino Argiantoro** (*Humanitarian Lead Respons Oxfam*)
- **Haris Oematan** (JMK-CIS Timor)
- **Yospina Liku La'bi** (JMK-PKBI Sulteng)
- **Nining Rahayu** (JMK-LBH APIK Sulteng)
- **Degina Adenessa** (*Media & Communication Officer*)
- **Nurwahida** (*Media & Communication Assistant*)
- **Ibnu Hajar** (MEAL *Officer*)
- **Prisca Sisca Vividayanti** (MEAL *Assistant*)
- **Nuraida** (*Livelihood Officer*)
- **Ifon** (WASH-PHP *Officer*)
- **Ichan** (*Protection Officer*)
- **Abdul Rahman Rifaldi** (*Livelihood Assistant*)
- **Iksan Maulvi Ahmad** (*Livelihood Assistant*)
- **Maspa** (*Gender Officer*)
- **Rizki Basuki** (WASH-PHE *Officer*)
- **Moh. Ardiansyah Rosli** (PHP *Assistant*)
- **Uljannah** (CO Desa Toaya Vunta)
- **Amirah** (CO Kelurahan Duyu)

Masyarakat yang hidup bersahabat dengan bencana dan tangguh menghadapi bencana adalah masyarakat yang disiapkan sejak dini. Berbagai metode dan pendekatan digunakan untuk menyiapkan masyarakat, mulai dari pengalaman, kebiasaan, kearifan lokal, hingga penguasaan ilmu dan teknologi mutakhir.

Pengalaman, pembelajaran, dan inovasi yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam penanganan bencana, perlu diikat menjadi pengetahuan yang dapat dibagikan, dimodifikasi, dan dikembangkan untuk menghasilkan metode dan pendekatan yang lebih baik. Untuk itu apa saja yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga ketika terjadi bencana, baik tanggap darurat maupun pemulihan harus menjadi dokumen pembelajaran dan pengetahuan bagi semua pihak.



RESPON PEMULIHAN PASCA TANGGAP DARURAT DI PALU , SIGI, DONGGALA - SULAWESI TENGAH

JEJARING MITRA KEMANUSIAAN



Didukung Oleh :  